



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TRAVEL TERHADAP
SUPIR YANG MENGALAMI KECELAKAAN PADA PT DOLOK
SORDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PADANG LAWAS KOTA SIBUHUAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Hukum (SH)*



OLEH

ANNER SUMANTRI LUBIS

11527204171

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Pertanggungjawaban Perusahaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami Kecelakaan Pada Pt. Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Padang Lawas Kota Sibuhuan"*

Nama : Anner Sumantri Lubis
NIM : 11527204171
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2019
Pembimbing Skripsi


Syafrinaldi, SH, MH
NIP. 198109232006041004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TRAVEL TERHADAP SUPIR YANG MENGALAMI KECELAKAAN PADA PT DOLOK SORDANG MENURUT UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADANG LAWAS. KOTA SIBUHUAN)”, yang ditulis oleh:

Nama : ANNER SUMANTRI LUBIS
NIM : 11527204171
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus,SH.,MH

Sekretaris
Muslim, S.Ag.,SH.,M.HUM

Penguji I
Ilham Akbar, SHL., SH.,MH

Penguji II
Dr. H. Abu Samah, MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Annner Sumantri Lubis (2020): *Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami Kecelakaan Pada PT. Dolok Sordang Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Padang Lawas Kota Sibuhuan.*

Pertanggung jawaban perusahaan travel terhadap supir yang mengalami kecelakaan pada PT. Dolok Sordang harus diperhatikan dengan baik, karena supir dari perusahaan travel Dolok Sordang pernah mengalami kecelakaan di jalan lalu lintas Sosa. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum pada pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Namun pada kenyataannya ganti kerugian itu semua dibebankan kepada supir travel tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana pertanggung jawaban perusahaan Travel terhadap supir yang mengalami kecelakaan pada PT. Dolok Sordang menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan apa faktor penghambat perusahaan Travel Dolok Sordang dalam melakukan pertanggung jawaban terhadap mobil Travel.

Penelitian ini merupakan penilaian hukum sosiologis (yuridis sosiologis) dimana penelitian ini dilakukan terhadap supir yang mengalami kecelakaan pada PT. Dolok Sordang. Data tersebut penulis kumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka, dengan sumber data primer dan skunder, kemudian dianalisis sumber data tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling yang terdiri dari 1 orang direktur PT, dan 20 supir Travel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan Travel terhadap supir yang mengalami kecelakaan pada PT. Dolok Sordang menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ada beberapa supir yang bertanggung jawab sendiri dan mengganti kerugian sendiri saat supir mengalami kecelakaan. Sedangkan faktor penghambat perusahaan Travel PT. Dolok Sordang dalam melakukan pertanggung jawaban terhadap supir Travel yang mengalami kecelakaan ini adalah akibat kurang pahamnya perusahaan terhadap aturan tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, kurangnya anggaran yang disediakan oleh perusahaan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aturan ini agar supir Travel dapat menikmati gajinya.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'amin, segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Agung atas segala anugrah dan perlindungan-Nya, nikmat iman, islam, hidup, kekuatan, serta jalan takdir dan keajaiban yang kesempurnaan-Nya takkan mampu tersentuh oleh bahasa. Ucapan syukur kepada Allah *Subhanallahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini. Salam dan Shalawat tetuju kepada Nabi Muhammad Sallahu'alaihi wassalam yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan mengucapkan "*Allahumma sholli 'alaa sayyidina Muhammad, wa 'ala alihi sayyidina Muhammad*".

Skripsi dengan judul "**Pertanggungjawaban Perusahaan Travel terhadap Supir yang Mengalami Kecelakaan pada PT Dolok Sordang Meburut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pdang Lawas Kota Labuhan**" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Walaupun terdapat kesulitan dan hambatan yang telah penulis alami selama proses penulisan skripsi ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut berkat kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah *Subhanallahu wata'ala*. Skripsi ini dapat diselesaikan bukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Akhirnya, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini diberikan kepada penulis, terutama kepada :

Allah *Subhanallahuwata'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa membukakan jalan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap proses penulisan skripsi ini.

Ayahanda Tercinta Abdul Gani dan Ibunda Tercinta Rosmaida, terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan semangat, motivasi, memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta nasehat untuk selalu berjuang dan tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-cita, hingga akhirnya penulis berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hal yang sama penulis ucapkan kepada keluarga-keluarga penulis, terima kasih atas doa serta motivasi yang telah diberikan selama ini yang selalu menguatkan penulis dan sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Bapak Firdaus, SH, MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim,S.Ag.,SH.,M.Hum selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Syafrinaldi, SH, MA, selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi yang begitu besar kepada penulis;

7. Ibu Dra. Nurlaili, M.Ag, selaku penasehat akademik yang selalu memberikan pengarahan dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis;

Kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2015 khususnya kepada teman-teman seperjuangan Lokal Ilmu Hukum B, Syahdatul Latif Nur Azizah Samsinar yang telah berbagi kebersamaan serta pengalaman bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama masa perkuliahan dan menjadi tim yang kompak didalam maupun diluar kelas;

10. Kepada teman-teman konsentrasi Hukum Bisnis Lokal A, Adelia Safitri S.H, Syahdatul Latif, S.H, Taufiq Ikhtiar Harefa,S.H, Safriandi,S.H dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Kepada teman-teman KKN Posko Makmur tahun 2018 di Desa Masda Makmur, Kecamatan Rambah Samo,Provinsi Riau:Anita Syafiri dan Maulana Malik, yang telah berbagi pengalaman bersama penulis selama dua bulan lamanya; dan
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis,

ANNER SUMANTRI LUBIS
NIM. 1152720417

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Padang Lawas.....	15
B. Visi Misi Padang Lawas Kota Sibuhuan.....	16
C. Visi dan Misi Perusahaan	22
D. Struktur Organisasi.....	24
BAB III TINJAUAN TEORI	
A. Perusahaan.....	25
B. Transportasi.....	38
C. Konsep Ketenagakerjaan.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel terhadap Supir yang Mengalami Kecelakaan pada PT Dolok Sordang menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Lawas Kota Sibuhuan.....	77
B. Apa Saja Faktor Penghambat PT. Dolok Sordang dalam Melakukan Pertanggung Jawaban terhadap Kecelakaan Mobil Travel.....	88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

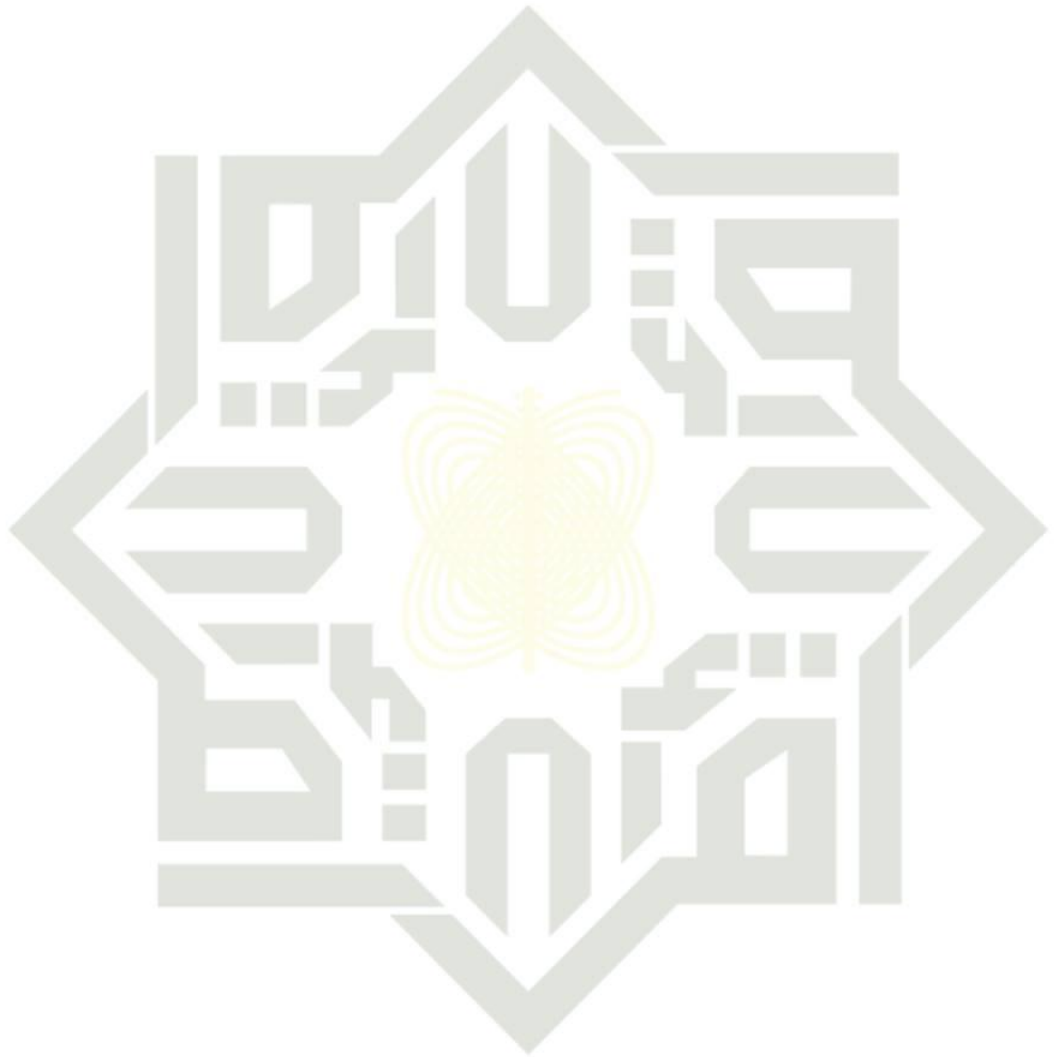
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	11
Tabel I.2	Bupati dan wakil bupati Padang Lawas (sejak tahun 2008 s/d sekarang)	16
Tabel IV.1	Apakah Pernah Terjadi Kecelakaan Saat Bekerja.....	79
Tabel IV.2	Apakah perusahaan PT Dolok Sordang mau bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan.....	80
Tabel IV.3	Pertanggungjawaban Biaya pengobatan supir jika terjadi kecelakaan.....	81
Tabel IV.4	Apakah supir Pt. Dolok Sordang sudah mematuhi aturan lalu lintas.....	82
Tabel IV.5	Apakah sarana prasarana Pt.dolok Sordang Telah Memenuhi standar operasional	83
Tabel IV.6	Apakah pihak pertama (direksi) memperhatikan proses travel jika terjadi pengangkutan penumpang atau barang.....	85
Tabel IV.7	Apakah PT Dolok Sordang memberikan ganti rugi terhadap kecelakaan pada pengangkutan penumpang atau barang.....	85
Tabel IV.8	Apakah PT Dolok Sordang telah menjalankan prosedur jika terjadi kecelakaan berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003	85
Tabel IV.9	Jika terjadi kecelakaan, apakah PT Dolok Sordang menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah.....	89
Tabel IV.10	Apakah pihak perusahaan pernah melakukan sosialisai mengenai pertanggung jawaban apabila terjadi kecelakaan ..	86
Tabel IV.11	Apakah saudara mengetahui mengenai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak dapat berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Disebutkan pula bahwa : “pemerintah Indonesia berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Bahkan karena urgensi penegasan yang dimaksud, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹

Dalam perkembangan hukum di negara Indonesia saat ini, dapat kita lihat bagaimana perubahan-perubahan di dalam segi tatanan kehidupan masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan aturan dan pola kehidupan masyarakat yang kurang sadar akan sebuah hukum menjadi salah satu visi pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang madani.

Seperti yang terjadi saat ini, banyaknya masalah-masalah hukum yang terjadi di Indonesia menjadikan pemerintah berusaha keras untuk membuat suatu aturan yang dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya sebuah kerukunan dalam hidup bernegara. Contohnya pada saat ini yang jelas dan nyata adalah kecelakaan lalu lintas di Sosa Kabupaten Padang Lawas, yang

¹ Undang-undang Dasar 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana pada kecelakaan lalu lintas ini supir travel menanggung sendiri biaya ganti rugi. Padahal didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pada Pasal 191 Ayat 1 disebutkan:

*“Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.*²

Dari pasal yang dijelaskan diatas dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuan dari pasal yang dicantumkan tersebut bahwa Perusahaan Travel dalam hal ini yang berposisi sebagai perusahaan yang mempekerjakan orang, maka jika terjadi kecelakaan lalu lintas seperti yang dijelaskan diatas maka perusahaan travel harus bertanggung jawab juga dengan apa yang dialami oleh supir travel tersebut. Dalam menentukan pertanggung jawaban perusahaan tentunya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga dapat di tentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab, hal-hal yang dapat dipertanggung jawabkan, bentuk-bentuk pertanggung jawaban, besar ganti kerugian dan lain-lain.

Perusahaan merupakan setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap serta terus menerus di dirikan, berkerja, dan berkedudukan dalam wilayah Negara indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. Dari pengertian tersebut, ada 2 unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusaha yaitu:

²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan.³

Dari pengertian yang dinyatakan diatas mengenai perusahaan, berarti yang menjadi fokusnya adalah Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, berarti PT. Travel tersebut termasuk dalam kajian tentang perusahaan. Kecelakaan mobil travel ini sering terjadi dan mengakibatkan banyak korban yang mengalami kerugian. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa tanggung jawab perusahaan travel dalam kecelakaan sopir travel dan penumpang beserta ganti kerugian yang dilakukan perusahaan PT. Dolok Sordang. Namun dalam kajian ini penulis hanya meneliti tentang tanggung jawab perusahaan travel terhadap sopir yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis yaitu perusahaan PT. Dolok Sordang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban selama kerugian tersebut disebabkan oleh perusahaan PT Dolok Sordang ataupun awak kendaraan mobil travel yang ditumpangi. Selain perusahaan PT Dolok Sordang, perusahaan asuransi juga bertanggung jawab atas kerugian korban dikarenakan korban telah membayar premi asuransi yang dilakukan secara kolektif oleh PT. Dolok Sordang bersamaan dengan pembayaran karcis perjalanan. Travel Sumber Group pembayaran ganti kerugian dilakukan

³Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka, 2012) h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada korban yang besarnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan selama kerugian tersebut dikarenakan oleh awak kendaraan mobil travel dari PT. Dolok Sordang.

Sedangkan untuk perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja pengajuan ganti kerugian harus dilakukan oleh korban sendiri yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Akibat kecelakaan adalah kerugian yang dialami oleh penumpang, baik kerugian secara fisik maupun materil, peraturan diatas dibuat untuk melindungi konsumen dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan PT. Dolok Sordang diharapkan melakukan seleksi yang ketat dalam merekrut pekerjaanya karena tanggung jawab yang diemban sangatlah besar, yaitu mengangkut penumpang selama sampai tujuan. Dengan adanya peraturan tersebut penumpang menjadi lebih tenang dalam melakukan perjalanan maupun pengangkutan karena telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Perusahaan asuransi juga melakukan ganti rugi kepada penumpang dengan besar yang dianggap cukup berdasarkan peraturan yang berlaku. Apabila perusahaan PT. Dolok Sordang tidak melakukan ganti kerugian maka perusahaan PT. Dolok Sordang tersebut beresiko untuk dibekukan oleh pemerintah dan tidak dapat beroperasi lagi. Kata kunci : Kecelakaan, Perusahaan PT. Dolok Sordang, Ganti Kerugian Korban Kecelakaan Menuju bangsa yang besar mutlak diperlukan suatu pembangunan nasional yang terencana, terukur, berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus.⁴

⁴H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Pengangkutan* (Jakarta : Djambatan, 1984), h 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, hal ini menjadi modal besar bagi Indonesia untuk maju. Tentu saja untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas-kualitas manusia yang unggul, yang mampu berdaya saing, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Perekonomian merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan di semua aspek kehidupan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan.

Perekonomian memegang peran utama dalam kelangsungan hidup suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Berbagai sektor penting masuk dalam bidang ekonomi, seperti perbankan, pasar modal, kegiatan ekspor-impor, dan lain sebagainya, dimana salah satu bidang tidak berjalan maka dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Agar dapat terlaksana, diperlukan mobilitas dari masyarakat itu sendiri untuk turut aktif menjadi agen pembangunan nasional. Bidang penunjang yang diperlukan masyarakat tersebut ialah transportasi. Transportasi menjadi sarana penggerak roda perekonomian Indonesia.

Membantu pemerintah dalam mempercepat laju ekonomi nasional dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Transportasi menjadi penyokong mobilitas masyarakat. Melakukan pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain, yang cepat dan efisien. Menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah yang secara otomatis, bila ditarik keatas, akan membantu negara mencapai pembangunan nasionalnya. Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor keseluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan.⁵

Perkembangan di bidang pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan di bidang ilmu dan teknologi pengangkutan modern, sarana dan prasarana angkutan modern, dan hukum pengangkutan modern terutama mengenai perkereta apian, perkapalan, pesawat udara, dan sumber daya manusianya. Mobil travel sebagai salah satu modal transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, memiliki tingkat pencemaran yang rendah.

Pengangkutan sebagai sebuah proses atau kegiatan memerlukan alat pengangkutan untuk mengangkut barang atau penumpang, atau membawa barang atau penumpang dari tempat permuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Fungsi pengangkutan pada dasarnya adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.⁶

Keunggulan dan karakteristik mobil travel tersebut, peran perusahaan PT perusahaan perlu lebih ditingkatkan dalam upaya pengembangan sistem transportasi nasional secara terpadu, untuk itu, penyelenggaraan penggunaan mobil travel yang dimulai dari pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung PT.Citra Aditya Bakti, 2013) h 31.

⁶Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) h. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengusahaan perlu diatur dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terselenggara angkutan mobil travel yang menjamin keselamatan, keamanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam satu penulisan hukum dengan judul “Pertanggung jawaban Perdata Perusahaan PT. Dolok Sordang (PO) Dalam Kecelakaan Penumpang”

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis telah mengambil batasan yang diteliti. Penelitian di fokuskan pada pertanggung jawaban perusahaan travel terhadap supir yang mengalami kecelakaan pada PT. Dolok Sordang dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 berdasarkan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Kecamatan Sosa, Padang lawas Kota Sibuhuan.

Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggung jawaban Perusahaan Travel terhadap sopir travel yang mengalami kecelakaan?
2. Apa faktor penghambat perusahaan travel dolok sordang dalam melakukan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan mobil travel?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini dapat adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban Perusahaan Travel terhadap sopir travel yang mengalami kecelakaan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat perusahaan pt dolok sordang tidak melakukan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan mobil travel.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁷. Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah hukum sosiologis (yuridis Sosiologis), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁸ Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Pendekatan dengan metode deskriptif adalah pendekatan horizontal sebagai lawan “pendekatan historis” yang merupakan “pendekatan vertikal”.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Pt Dolok Sordang Padang Lawas Kota Sibuhuan Adapun

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UIN Press, 1982), h. 33.

⁹Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), Cet. Ke 4, h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan nya adalah disamping penulis berasal dari desa tersebut, penulis melihat sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti, yaitu kurang bertanggung jawabnya sebuah perusahaan Travel yang ada di Padang Lawas Kota Sibuhuan ini terhadap supirnya.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan PT. Dolok Sordang Kabupaten Padang Lawas Kota Sibuhuan dan supir travel. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pertanggung jawaban ganti rugi oleh perusahaan angkutan umum terhadap pekerja kecelakaan sopir travel berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Apa saja faktor penghambat perusahaan PT Dolok Sordang tidak melakukan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan mobil travel.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian¹⁰. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel di PT Dolok Sordang Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan dengan pengambilan menggunakan metode *Total Sampling*.

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015) h.98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

NO.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Direktur PT	1	1	100%
2	Supir Travel	80	30	37%
Jumlah		81	31	38%

Sumber: Olahan Penulis 2017-2019

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹¹ baik dengan metode pengamatan (*Observasi*) ataupun wawancara (*Interview*) dengan PT Dolok Sordang dan Supir Travel yang bekerja di perusahaan tersebut.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan perundang-undangan.¹² Disini penelitian mengambil data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan berbagai sumber hukum lainnya.
- c. Data Tersier yaitu, data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-7, h.30.

¹² Zainuddin Ali., *Op.cit*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan gejala-gejala yang diselidiki.
- b. Wawancara, yaitu suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini diajukan kepada pemilik perahu kempang dan masyarakat pengguna jasa kempang.
- c. Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara yang menghasilkan penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya.

Selanjutnya penulis mengambil suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta-fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu sejarah padang lawas sejarah PT Dolok Sordang.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan teori yang berhubungan dengan penelitian.

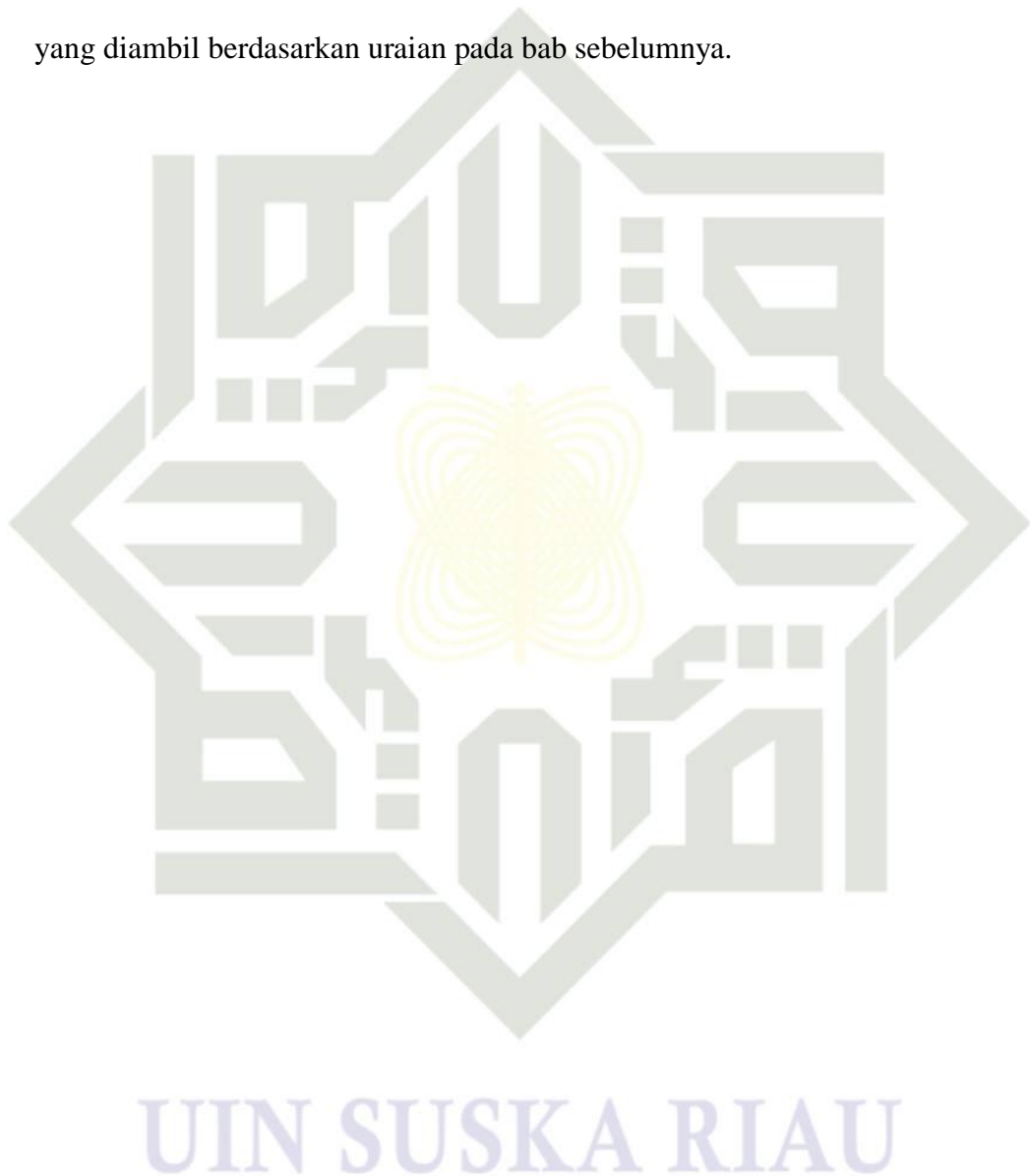
BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang pertanggung jawaban ganti rugi oleh perusahaan angkutan umum terhadap pekerja kecelakaan sopir travel berdasarkan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, faktor penghambat perusahaan PT Dolok

Sordang tidak melakukan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan mobil travel.

BABV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Padang Lawas

1. Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yakni hasil pemekaran dari Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten ini resmi di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan bentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 juli 2007. Ibu kota Kabupaten Padang Lawas adalah Sibihuan. Kepala daerah yang pertama kali memimpin Kabupaten Padang Lawas adalah Pj. Bupati Ir. Soripada Harahap.

Sesuai hasil pilkada Kabupaten Padang Lawas pertama yang dihelat pada tahun 2008, kepala daerah terpilih adalah Bupati Basyrah Lubis, sh dan wakilnya H.Ali Sutan Harahap (TSO). Kabupaten Padang Lawas sempat di pimpin H.Ali Sutan Harahap (TSO) yang sebelumnya merupakan wakil bupatinya di berhentikan oleh mandagri tanpa di pimpin oleh wakil bupati hingga berakhirnya sisa periode 2008 – 2013.¹³

Pada tahun 2013, setelah Kabupaten Padang Lawas melaksanakan pemilu kedua kalinya untuk periode 2013-2018, Kabupaten ini di pimpin oleh H.Ali Sutan Harahap (TSO). Sebagai bupati dan Drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu. Secara umum Kabupaten Padang Lawas memiliki iklim

¹³Profil Kabupaten Padang Lawas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tropis dengan rata-rata antara 14-36 C. Berdasarkan ketinggian wilayahnya, Kabupaten Padang Lawas (altitude) 915 di atas permukaan laut (dpl). pada tahun 2007, Kabupaten Padang Lawas memiliki curah yang hujan 167 mm/tahun dengan rata-rata curah hujan 167 mm/bulan. Curah hujan di Kabupaten Padang Lawas dalam kurang waktu 5 (lima) tahun terakhir (2003-2007), yaitu curah hujan yang tinggi pada tahun 2006 yaitu 2.014 mm/tahun dengan rata-rata curah hujan 168 mm/bulan. Sementara jumlah hujan yang terendah terdapat pada tahun 2004 yaitu 1.865 mm/tahun dengan rata-rata jumlah hujan 155 mm/bulan.

Tabel I.2
Bupati dan wakil bupati Padang Lawas (sejak tahun 2008 s/d sekarang)

No	Bupati	Mulai menjabat	Akhir menjabat.	Prd	Ket	Wakil Bupati
–	Soripada Harahap	2007	2009		–	–
1.	Basryah Lubus	2009	2012			Ali Sutan Haragap
2.	Ali Sutan Harahap	12 April	12 Februari 2014			–
		10 Februari 2014	10 Februari 2019	2	(4)	Ahmad Zarnawi Pasaribu
		10 Februari 2019	10 Februari 2019	3 (2018)	(5)	

Visi Misi Padang Lawas Kota Sibuhuan

1. Visi Padang Lawas

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan majelis permusyawaratan rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korupsi, kolusi dan neptisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang azas-azas pemerintahan yang baik.

- b. Adapun yang dimaksud “berkualitas” adalah penyelenggaraan pemerintah yang memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan dan mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Adapaun yang dimaksud “tertib administrasi” adalah penyelenggaraan sistem tata kelola administrasi dengan mengedepankan ketersediaan data dan dokumentasi sesuai tahapan proses pelaksanaan kegiatan.

2. Misi Padang Lawas

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Menyelenggarakan pemerintah yang transparan dan akuntabel.
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur guna mendukung sistem pelayanan publik.¹⁴

Berikut 12 (dua belas) dan wilayah kabupaten Padang lawas;

- a. Aek Nabara Barumun
- b. Barumun
- c. Barumun Selatan
- d. Barumun Tengah
- e. Batang Lubu Sutam

¹⁴Susetyo, S.(2010),” Some notes on the megalithic remains in Padang Lawas”, dalam Sumanjuntak, T.; Hisyam, M.; Prasetyo, B.; Nastiti, T.S., Archaeology, Indonesia Perspective: R.P Soejono’s Festschrift, Jakarta: LIPI Press, hlm. 317-324.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Huristak
- g. Huta Raja Tinggi
- h. Lubuk Barumon
- i. Sihapas Barumon
- j. Sosa
- k. Sosopan
- l. Ulu Barumon

Situs arkeologi Padang Lawas terletak sebagian di Kabupaten ini. Mencakup daerah sekitar 1.500 km, situs arkeologi meliputi Kecamatan Barumon, Kecamatan Barumon Tengah, dan Kecamatan Sosopan sampai ke Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kabupaten Padang Lawas terdapat potensi wisata khususnya wisata-wisata alam dan wisata budaya. Potensi-potensi ini belum sempat dikelola oleh pemerintah secara maksimal. Beberapa tempat wisata di Kabupaten Padang Lawas antara lain sebagai berikut:

- a. Pemandian Aek Siraisan di Siraisan, Kecamatan Ulu Barumon
- b. Pemandian Aek Milas di Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumon
- c. Makam Oppu Permata Sapihat di desa Minabo, Kecamatan Barumon
- d. Danau Gayambang di Ujung Batu, Kecamatan Sosa
- e. Candi Sipamutung di desa Siparau, Kecamatan Barumon Tengah
- f. Candi Tandihat di desa Tandihat, Kecamatan Barumon Tengah
- g. Candi sangkilon di desa Sangkilon, Kecamatan Lubuk Barumon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. PT Dolok Sordang

a. Sejarah Perusahaan

Sumatera utara memiliki daya tarik untuk menjadikan propinsi ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hal ini membuat tingginya akan kebutuhan angkutan umum untuk mencapai daerah tujuan. Untuk memudahkan masyarakat ketempat tujuan, telah banyak perorangan yang mendirikan perusahaan angkutan kendaraan bermotor umum. Yang dimaksud dengana kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan di pungut bayaran. .

Angkutan sewa ini mulai beroperasi dalam jasa angkutan manusia dan barang semenjak tahun 2004. Pada awalnya belum berdiri sendiri, baru berupa kerja sama dengan perusahaan angkutan sewa lain yang terlebih dahulu. Setelah beberapa kali berganti kemitraan dengan angkutan sewa lain yang ada di kota Sibuhuan, pada tahun 2008 barulah mendirikan perusahaan angkutan sendiri yang diberi nama PT. Dolok Sordang bersamaan dengan keluarnya izin menjalankan kegiatan angkutan sewa dari dinas perhubungan.¹⁵

Pemerintahan Republik Indonesia c.q. lembaga pengelolaan dan penyelenggaraan pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 2018 pelayanan tentang pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan izin usaha berupa Izin

¹⁵Sejarah PT.dolok serdang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan angkutan orang kepada perusahaan transportasi.

Seperti contoh surat izin usaha sebagai berikut:

Nomor perusahaan : PT Putra Dolok Sordang
Nomor induk berusaha : 9120300201215
Alamat perusahaan : Jl. Kihajardewantara
Nama KBLI : Angkutan bus antar kota dalam provinsi
(AKDP), angkutan bus kota, angkutan bus pariwisata
Kode KBLI : 492134921449221
Lokasi usaha
1) Alamat : JL K H Dewantara
2) Desa/Kelurahan : Pasar Sibuhuan
3) Kecamatan : Barumun
4) Kabupaten /Kota : Kab. Padang Lawas
5) Provinsi : Sumatera Utara

Izin penyelenggaraan angkutan oarang isi belum berlaku efektif,

- 1) Dengan telah di milikinya izin usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan sebagaimana diatur pada pasal 38 PP 24/2018;
- 2) Agar izin usaha dapat berlaku efektif perusahaan wajib melakukan:
 - a) Pemenuhan komitmen prasarana dasar dasar sesuai kebutuhan yaitu izin usaha lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AMDA) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;

- b) Penentuan komitmen sesuai persyaratan izin usaha kepada Kementerian Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangan;
- c) Pembayaran pemerintahan negara bukan pajak atau pajak daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal :11 Februari 2019

Travel PT.Dolok Sordang Travel merupakan jasa angkutan orang dalam trayek (AJAP) yang melayani rute Sibuhuan-Ujung Batu Sosa Pasir Pengaraian Ujung Batu Rokan Pekanbaru, Sidimpuan dan ini beralamatkan di Padang Lawas kota Sibuhuan. ¹⁶ Travel PT. Dolok Sordang ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang bukan hanya penumpang yang berasal dari Kota Sibuhuan saja melainkan juga masyarakat luar Kota Sibuhuan seperti Kota Padang Sidimpuan, dan Sosa yang merupakan jalur yang di lalui untuk menuju Kota Pekanbaru.

Dalam menjalankan kegiatannya Travel ini memanjakan pengguna jasanya dengan menjemput dan mengantarkan langsung dari dan ke rumah penumpangnya langsung dengan cara pemesanan tiket dengan menghubungi agen travel lewat telepon tanpa harus datang ke kantor terlebih dahulu. Perjalanan yang menempuh waktu kurang lebih 5

¹⁶<https://pttrb-travel.business.site/> diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 22.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(lima) jam perjalanan, travel ini melayani pengguna jasanya dengan jadwal berangkat 5 (lima) kali dalam sehari yaitu pagi pada Pukul 10.00 WIB dan sampai malam pada Pukul 22.00 WIB.

Perusahaan angkutan umum Travel PT. Dolok Sordang memiliki jumlah yang beroperasi sebanyak 50 (lima puluh) mobil dengan muatan 11 (sebelah) orang. Jumlah karyawan yang dipekerjakan yang terdiri dari agen yang berjumlah 2 (dua) orang dan sopir yang berjumlah 80 (delapan puluh) orang.

Perusahaan ini memberikan perhatian penuh kepada konsumen dengan mengutamakan kepuasan pengguna jasanya dengan 2 (dua) kali waktu pemberhentian yaitu waktu untuk makan/mengerjakan sholat dan memberikan kesempatan kepada penumpang untuk bisa berbelanja oleh-oleh untuk dibawa ke tempat tujuan. Peningkatan seluruh pelayanan ini untuk dapat memenuhi kenyamanan dan kepuasan pengguna jasanya.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan yang menyediakan layanan transportasi yang terdepan dan berkualitas, layanan armada ini sangat bagus bagi masyarakat dan bisa menjadi sahabat bagi penumpang.

2. Misi Perusahaan

- a. Petugas loket dan pelaksana armada yang sopan dan ramah kepada penumpang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan antar jemput penumpang dalam hal keberangkatan sampai tujuan.

Struktur organisasi pada PT. Dolok Sordang di pimpin oleh pemilik perusahaan sendiri dan dibantu oleh agen di masing-masing kantor perwalikan dan sopir.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:

1. Pimpinan

- a. Mengurus urusan yang berhubungan dengan pihak lain diluar perusahaan, baik soal perizinan, kemitraan, dan urusan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.
- b. Bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut perusahaan.

2. Agen

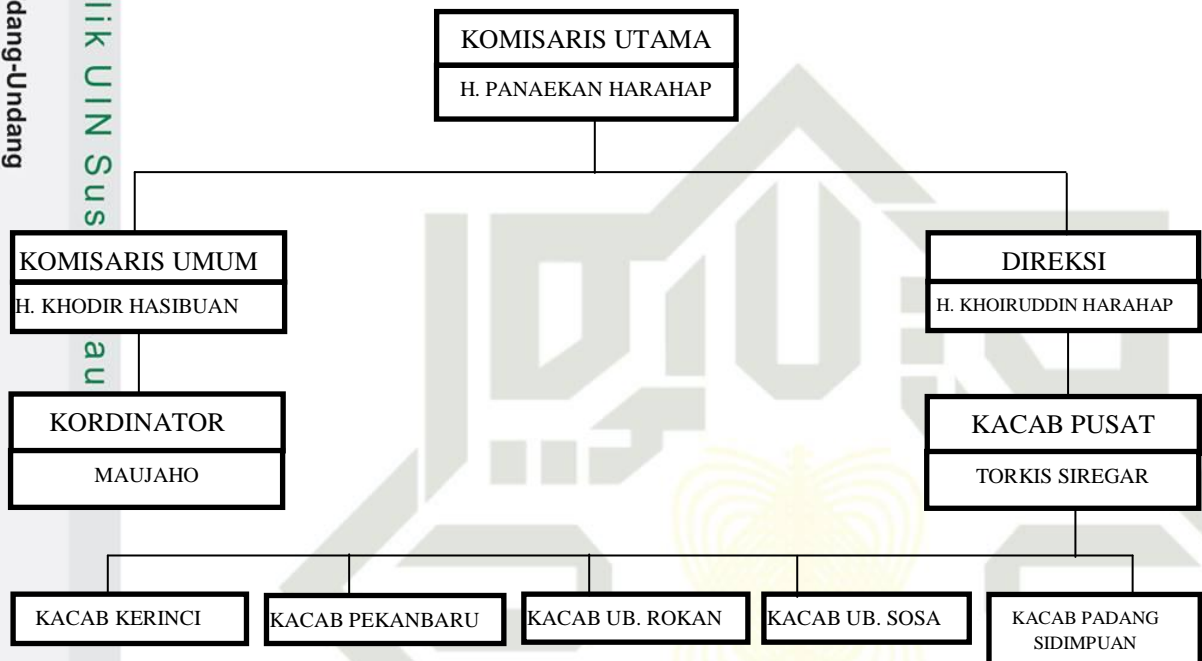
- a. Menkoordinasi seluruh sopir
- b. Bertanggung jawab seluruh atas kegiatan seluruh di kegitan masing-masing dikantor
- c. Berwenang memberikan izin jalan (surat jalan) bagi supir yang berangkatsetiap harinya
- d. Mengawasi dan memberikan sanksi kepada supir-supir yang melakukan pelanggaran
- e. Menuliskan tiket yang akan diberikan kedapa penumpang

3. Supir

- a. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, baik kebersihan maupun kondisi mesin

- b. Mengantar konsumen dari Sibuhuan ke Pekanbaru dengan aman, nyaman dan selamat sampai ke rumah penumpang dengan selamat

D. Struktur Organisasi Perusahaan ¹⁷



¹⁷Struktur organisasi PT.dolok serdang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang di pakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak di jelaskan pengertian resmi dari istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang 3 tahun 1982 tentang wajib daptar perusahaan (selanjutnya di singkat UWPD).¹⁸

Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang *wajib daftar perusahaan (UWDP), definisis perusahaan sebagai berikut: perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang meenjalankan setiap jenis uasha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, seta kedudukan dalam wilayah negara indonesia untuk tujuan memperoleh ke untungan dan atau laba.*¹⁹

Dalam Pasal 1 huruf (d) UWDP dirimuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan

¹⁸C.S.T. Kansil Crrhristine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001), h. 1.

¹⁹Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang *wajib daftar perusahaan (UWDP), definisis perusahaan.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, Pasal 1 huruf (c) UWDP.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu:

- a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, dalam bahasa Inggris disebut *company*.
- b. Jenis usaha kegiatan yang berupa dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba, dalam bahasa Inggris disebut *business*.²⁰

2. Unsur-unsur Perusahaan

Unsur-unsur tersebut dibahas demi satu persatu dan diuraikan berikut ini:

a. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi itu mempunyai bentuk tertentu, seperti Perusahaan Dandang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Koperasi. .

b. Kegiatan dalam bidang ekonomi

Objek dalam kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, tujuannya ialah memperoleh keuntungan dan atau laba. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri, yang dapat dirinci sebagai berikut:

²⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perdagangan meliputi jual beli barang bergerak dan tidak bergerak misalnya ekspor-impor, bursa efek, restoran toko swalayan, perumnas, valuta asing.
 - 2) Pelayanan meliputi penyediaan jasa, misalnya biro perjalanan, biro konsultan, salon kecantikan, kursus, keterampilan menjahit, busana, perbankan pengangkutan, perbengkelan.
- c. Terus menerus
- Baik molegraff, polak, maupun pembentukan undang-undang menentukan bahwa kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus menerus, artinya tidak terputus-putus, tidak secara insidental, tidak sebagai sambilan, bersifat untuk jangka waktu lama.
- d. Terang-terangan
- Terang terang artinya diketahui oleh umum dan ditujukan kepada umum, tidak selundup-selundupan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan bebas hubungan dengan pihak lain (pihak ketiga).
- e. Keuntungan dan/atau laba
- Molegraff menggunakan istilah penghasilan, polak, menggunakan istilah lama, pembentuk undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan/atau laba. Ketiga macam istilah ini adalah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang dijalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pembukaan

Dalam rumusan molegraff tidak dapat unsur pembukaan. Tetapi polak menambahkan unsur ini dalam pengertian perusahaan. Pasal 6 KUHD mengharuskan pengusaha membuat pembukuan yang berisi tentang harta kekayaan kewajiban perusahaan.

3. Sejarah Hukum Perusahaan Indonesia (Hindia Belanda)

Pada saat pembicaraan rencana pemberlakuan hukum belanda di Hindia Belanda (Indonesia), muncullah 2 (dua) blok pendapat atau pemikiran di antara para ahli hukum belanda di masa itu:

- a. Pendapat I: Meningkatkan agar seluruh hukum Belanda di berlakukandi Hindia Belanda agar penjajahan belanda di Hindia Belanda bisa lanngeng.
- b. Pendapat II: Tidak setuju asas konkordansi dilaksanakan secara utuh di Hindia Belanda, sebab di masyarakat Indonesia sudah ada hukum yang hidup dan mengatur kehidupan masyarakat yang lebih di kenal dengan sebutan hukum adat (*adatrecht*). Di samping itu, kenyataanya banyak sekali hukum Belanda (Eropa) yang bertentangan hukum asli orang Indonesia (Hukum adat). Namun demikian, tidak ada larangan bagi orang Indonesia untuk menundukkan diri secara sukarela pada hukum Eropa. Untuk mengakomodasikan hal ini dibentuklah Lembaga Tunduk Sukarela.²¹

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia: Cetakan Keempat Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010 h.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya berdasarkan asas konkordansi kedua kodifikasi itu juga diberlakukan di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) dengan nama kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan kita Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sendiri dipublikasikan pada tanggal 30 April dalam Stb. 1847/23, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

4. Sumber Hukum Perusahaan

a. Perundang-undangan

Perundang-undangan ini meliputi ketentuan Undang-Undang peninggalan pada zaman Hindia Belanda dahulu, yang masih berlaku hingga sekarang berdasarkan peraturan UUD 1945, seperti ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan KUHD. Selain itu sudah banyak Undang-Undang yang diciptakan oleh pembuat Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai perusahaan yang berkembang cukup pesat hingga saat ini.²²

Berlakunya KUHPerdata setiap perjanjian dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian baik bernama maupun tidak bernama tunduk pada ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Yang dimaksud dengan bab ini adalah bab yang kedua tentang perikatan yang timbul karena perjanjian, sedangkan yang dimaksud dengan bab yang lalu adalah bab kesatu tentang perikatan pada umumnya. Kedua bab tersebut terdapat dalam buku III KUHPerdata yang mengatur

²²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang perikatan (*verbinten*). Dengan demikian KUHPdata berkedudukan sebagai hukum umum (*lex generalis*).²³

Sedangkan KUHD berkedudukan sebagai hukum yang khusus (*lex specialis*). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 KUHD yang menentukan bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam kitab Undang-Undang ini (KUHD), sekedar dalam Undang-Undang ini tidak diatur dalam khusus menyimpang. Misalnya kita KUHPdata diatur tentang pemberian kuasa (*lastgeving*), KUHD diatur juga dalam pemberian kuasa secara khusus mengenai surat berharga.

Selain dari ketentuan yang masih berlaku didalam KUHPdata dan KUHD, juga sudah diundangkan banyak sekali Undang-Undang yang di buat oleh pembuat Undang-Undang RI yang mengatur tentang perusahaan antara lain:

- 1) Badan Usaha Milik Negara(BUMN);
- 2) Hak Milik Intelektual(HAKI);
- 3) Pengangkutan darat, perairan, dan udara;
- 4) Perasuransian (kerugian, sejumlah uang, dan sosial);
- 5) Perdagangan dalam dan luar negeri;
- 6) Perkoperasian dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
- 7) Pasar modal dan penanaman modal;
- 8) Hak-hak jaminan atas tanah;

²³Kitab Undang-Undang Hukum dagang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Izin usaha pendaftaran perusahaan;
- 10) Perbankan dan lembaga pembiayaan;
- 11) Perseroan terbatas;
- 12) Dokumen perusahaan.²⁴

b. Kontrak Perusahaan

Pada zaman modern semua perjanjian tau kontrak perusahaan selalu di buat tertulis, baik bertaraf nasional maupun internasional. Kontrak perusahaan ini merupakan sumber utama kewajiban dan hak, serta tanggung jawab pihak-pihak. Jika terjadi perselisihan mengenai pemenuhan secara damai. Tetapi tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak, biasanya mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase atau pengadilan. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam kontrak.²⁵

Pada pelaksanaa kontrak perusahaan terkadang melibatkan pihak ketiga, baik berkaitan dengan penyerahan barang maupun cara pembayaran harga. Dalam penyerahan barang, pihak ketiga yang dapat di libatkan adalah perusahaan ekspedisi, pengangkutan, pergudangan, asuransi. Sedangkan dalam pembayaran harga, pihak ketiga yang selalu dilibatkan adalah bank.pada perusahaan modern,semua lalu lintas pembayaran selalu melakukan bank dengan menggunakan surat berharga yang disertai oleh dokumen-dokumen penting lainnya.

²⁴*Ibid.*

²⁵Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Rifika Aditama, Bandung, 2006. h. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontrak perusahaan selalu terikat dengan ketentuan Undang-Undang berdasarkan asas pelengkap, yaitu asas yang menyatakan bahwa kesepakatan pihak-pihak. Tetapi jika dalam kontrak tidak ditentukan, maka ketentuan Undang-Undang yang diberlakukan. Pada kontrak yang bertaraf nasional mungkin tidak ada masalah mengenai ketentuan Undang-Undang ini. Pada kontrak yang bertaraf nasional mungkin timbul masalah, yaitu ketentuan Undang-Undang pihak mana yang diberlakukan, disini pihak-pihak berhadapan dengan masalah pilihan hukum (*choice of law*).

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan kewajiban dengan hak tertentu. Dalam yurisprudensi, kewajiban dan hak-hak yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang oleh sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa kewajiban dan hak antara pihak-pihak.

d. Kebiasaan

Dalam praktik perusahaan, kebiasaan merupakan sumber yang dapat diikuti oleh para pengusaha. Dalam Undang-Undang dan perjanjian, tidak semua hal mengenai pemenuhan kewajiban dan hak diatur. Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perbuatan yang bersipat keperdataan;
- 2) Mengenai kewajiban dan hak yang seharusnya dipenuhi;
- 3) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan;
- 4) Diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut; dan
- 5) Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.

5. Kedudukan Hukum Perusahaan

Ruang lingkup hukum perusahaan ada pada lapangan hukum perdata (khususnya hukum dagang) dan sebagian ada pada hukum administrasi negara yang tercermin pada peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata dan KUHD.

Dengan demikian, kedudukan hukum perusahaan terletak pada Hukum Dagang (termasuk Hukum Perdata) sekaligus juga terletak pada Hukum Administrasi Negara dan Hukum Ekonomi. Dengan kata lain, Hukum Perusahaan terletak dalam Hukum Pribat sekaligus pada Hukum Publik Ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan mempunyai tiga aspek sekaligus, yaitu Ekonomi Perusahaan, Hukum Dagang/Perdata (Pribat), dan Hukum Administrasi Negara (Publik).²⁶

6. Bentuk- Bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk usaha/perusahaan (*business organization*) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut masih merupakan

²⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninggalan dimasa lalu (pemerintah Belanda). Namun diantara sudah ada yang diganti dengan sebutan dalam bahasa Indondonesia, tetapi kebanyakan masih tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakainnya misalnya, *Burgelik Maatschap/Maatschap*, *Vennotschap onder Firma* atau *Firma (Fa)*, dan *Naamloze Vennotschap* (CV). Selain itu, ada pula yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT, yang sebenarnya berasal dari *Naamloze Vennotschap* (NV). Di sini kata “Vennotschap” diartikan menjadi kata “perseroan”, sehingga dengan demikian dapat dijumpai sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer dan Perseroan Terabatas. Bersama dengan itu, ada juga yng menggunakan kata perseroan dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan perusahaan pada umumnya.²⁷

Barang kali, yang paling sesuai untuk pemakain kata “perseroan” adalah dalam hal penyebutan Perseroan Terbatas (PT), karena dalam kenyataanya PT itu memang mengeluarkan saham atau sero. Seluruh modal PT terbagi dalam saham, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Namun untuk bentuk uasaha seperti *Maatschap* (demikian juga Firma dan CV) sebaiknya tetap diterjemahkan dengan menggunakan kata “persekutuan” dari pada pemakian kata perseroan. Hal ini sesuai dengan arti kata perseroan itu sendiri dan pula *Maatschap*, Firma dan CV tidak menerbitkan saham. Jadi kata, “persekutuan” tetapi dipakai untuk padanan

²⁷ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.h.239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maatschap, Firma dan CV ini sesuai pula dengan terjemahan yang dipakai KUHPerdara. Tetapi perlu di ingat bahwa CV juga mengenal dengan pelepasan uang, sehingga ada salah satu jenis CV yang disebut “CV atau saaham “ tidak ada salahnya untuk menyebutnya sebagai “perseroan”.

Berdasarkan pada beberapa definisi perubahan yang dikemukakan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa bentuk-bentuk perkumpulan dan badan usaha itu bermacam-macam, di antaranya:

- a. Ditinjau dari segi himpunan (pertkumpulan) dibagi dua:
 - 1) Himpunan orang (*persoonen associati/nirlaba*). Himpunan orang ini memiliki karakter, antara lain: pengaruh asosiasi terhadap anggotanya sangat besar; anggotanya sedikit/terbatas; dan anggotanya tidak mudah keluar/masuk (*tertutu*).
- b. Ditinjau dari pemilik modalnya, bentuk usaha atau perusahaan dibagi dua, yaitu:
 - 1) Usaha atau perusahaan perseorangan (satu pengusaha/pemilik modal).
 - 2) Usaha atau perusahaan berbentuk persekutuan (beberapa pengusaha/pemilik modal).²⁸
- c. Baik secara teoretis maupun tinjauan dari status hukumnya, bentuk usah/ perusahaan milik dua bentuk:
 - 1) Bentuk usaha/perusahaan badan hukum. Misalnya *Vennotschap onder Firma* (Firma), dan *Comanditer Venootschap* (CV).

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bentuk usaha/perusahaan badan hukum. Misalnya Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Undang-Undang tidak dapat menjabarkan definisi badan hukum. Selain istilah badan hukum diadopsi dari istilah Belanda (*rechtspersoon*), atau istilah Inggris (*legal persons*). Agar uraian ini lebih sistematis, maka definisi badan hukum lebih lanjut akan dijelaskan pada Bab VI.²⁹

KUHPerdata Pasal 1653 hanya menyebutkan jenis-jenis perkumpulan atau badan hukum:

- a. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum ;
- b. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
- c. Perkumpulan yang dikenakan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Perusahaan yang bukan badan hukum meliputi bentuk-bentuk Perusahaan Dangan sebagai berikut:

- a. Perusahaan perseorangan, yang wujudnya berbentuk Perusahaan Dangan (PD) atau Usaha Dangan (UD)
- b. Persekutuan, yang terdiri dari bentuk-bentuk:
 - 1) Persekutuan Perdata (*Manatschap*)
 - 2) Persekutuan Firma (*Fa*)
 - 3) Persekutuan Komanditer (*CV*)

²⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sisi lain dikenakan juga perusahaan berbadan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan antara lain sebagai berikut:

- a. Maskapai Andil Indonesia (IMA)
- b. Perseroan Terbatas (PT)
- c. Koperasi
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - 1) Perusahaan Persero (Persero)
 - 2) Perusahaan Umum (Perum).³⁰

Mengingat rumusan badan hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria badan usaha/perusahaan yang dapat dikelompokkan sebagai badan hukum jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pribadi (pemilik);
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Adanya pengurus atau organisasi yang teratur;
- e. Dinyatakan pengakuan melalui peraturan perundang-undangan;
- f. Adanya pengesahan dari pemerintah dan;

³⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1653.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Transportasi

1. Pengertian Angkutan

Angkutan adalah kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal (original) ketempat tujuan (destination).³¹ Menurut KBBI definisi transportasi merupakan moda transportasi darat untuk umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan diartikan sebagai perpindahan orang dan/atau barang satu tempat ketempat lain dengan menggunakan ruang lalu lintas angkutan jalan, KUHD Pasal 446 dan 521 memberikan definisi angkutan sebagai dia yang mengikat dirinya untuk menyelenggarakan barang atau orang berdasarkan perjanjian pemuatan menurut waktu menurut perjalanan atau berdasarkan perjanjian lain.³²

Menurut Papacostas, angkutan (transportasi) di definisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem *control* yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia.

Pengangkut orang dalam pasal 1339 KUHPdata adalah menurut inti perjanjian yang berkewajiban untuk mengangkut dengan cara aman sehingga ia bertanggung jawab untuk segala kerugian dan luka-luka yang di derita oleh penumpang karena berhubungan dengan pengangkutan ini

³¹Rahardjo Adisasmita, *Dasar Dasar Ekonomi Trasnfortasi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010),h,1 Cet ke-1.

³²Sation Usman, dkk *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), h, 6 Cet ke-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

concreto itu, kecuali jika pihak pengangkut dapat mendiskulpir dirinya (membuktikan tentang kesalahannya penumpang sendiri atau adanya keadaan memaksa di luar kemampuan pencegahan).

Transportasi manusia atau barang bukan merupakan suatu tujuan akhir. Oleh sebab itu permintaan akan barang atau jasa transportasi dapat disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditas atau jasa lainnya. Dengan demikian permintaan akan ada apabila terdapat factor-faktor pendorongnya.

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman.

Agar suatu pelayanan dapat disebut sebagai pelayanan angkutan umum, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut :³³

- a. Adanya muatan yang diangkut, yaitu adanya orang atau penumpang yang akan diangkut.
- b. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya, yaitu adanya sarana angkutan berupa kendaraan.
- c. Adanya jalanan yang dapat dilalui, yaitu adanya prasaran atau tempat lintasan yang akan dilalui oleh angkutan umum.
- d. Adanya terminal asal dan terminal tujuan, yaitu adanya rute yang akan dituju oleh angkutan umum.

³³<https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=219330> diakses pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 22.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut, yaitu adanya suatu wadah untuk mengelola angkutan tersebut.

Pada dasarnya permintaan angkutan diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. Kebutuhan manusia untuk bepergian dari lokasi lain dengan tujuan mengambil bagian didalam suatu kegiatan, misalnya bekerja, ke sekolah dan lain-lain.
- b. Kebutuhan angkutan barang untuk dapat digunakan atau di konsumsi di lokasi lain.

Dampak kemajuna industri yang berbasis ilmu dan teknologi di rasakan disemua bidang kehidupan manusia. Di bidang transportasi, kapal terbang, kapal laut, kereta api, dan mobil penyebabnya kemudahan orang untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya.³⁴

2. Defenisi dan Klasifikasi Angkutan Umum

Sebelum kita sampai kerincian operasi, pelayanan, dan karakteristik sistem angkutan, ada baiknya kita mendefenisikan sejumlah istilah yang digunakan pada transportasi umum perkotaan. Disini, kita juga menguraikan karateristik pelayanan angkutan. Selama bertahun-tahun, telah banyak terdapat kontroversi tentang apa yang dimaksud dengan

³⁴Setijati D. Sastraoradja, *Memupuk kehidupan di Nusantara*, (Jakarta Yayasan Pustaka Por Indonesia, Oktober 2010), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moda transportasi. Klasifikasi moda dapat dilakukan untuk angkutan yang didasarkan pada tiga karakteristik:³⁵

- a. kereta api atau dengan jalur kendaraan lain. Dalam arti tertentu, kategori ini mirip dengan sistem bus dan sistem bus bebas-hambatan.
- b. *Kategori B*: mencakup jenis R/W yang secara fisik terpisah dari lalu lintas lain, tetapi dengan persilangan sebidang untuk kendaraan dan pedestrian, termasuk pula persimpangan biasa. Sistem kereta api-ringanyang menyalangkan beberapa jalan pada permukaan tanah termasuk ke dalam kategori ini.

3. Pengertian Transportasi

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau pergerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut, lokasi asal, ke lokasi lain, yang bisa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu untuk menggunakan alat tertentu pula.³⁶

4. Jenis-jenis Transportasi dan Pengaturannya

Jenis-jenis transportasi dan pengaturannya adalah sebagai berikut:³⁷

a. Angkutan Darat

Angkutan darat adalah segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan darat untuk mengangkut penumpang ataupun barang. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Fidel Miro, *pengantar sistem transportasi*, (Erlangga 19 Oktober 2013), h. 1.

³⁷ <http://sarahfhunas.blogspot.com/2015/03/jenis-pengangkutan-dan-pengaturannya.html?>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angkutan darat ialah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta api.

Peraturan yang membahas mengenai angkutan darat di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) KUHD yang sudah diatur sistematis dalam Buku I Bab V bagian 2 dan 3 mulai Pasal 90 s/d 98. Dalam bagian ini juga di atur sekaligus pengangkutan darat dan perairan darat tetapi khusus angkutan barang.
- 2) Peraturan Khusus nya yaitu:
 - a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Arian
 - b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Angkutan laut

Angkutan merupakan suatu kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal di definisikan sebagai kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang di gerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaturan mengenai Pengangkutan laut diatur dalam:

- 1) KUHD Buku II bab V tentang perjanjian charter kapal.
- 2) KUHD Buku II bab V-A tentang pengangkutan barang-barang.
- 3) KUHD Buku II bab V-B tentang pengangkutan orang.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

c. Angkutan udara

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lainnya atau beberapa bandar udara. Transportasi udara merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat. Transportasi ini menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutan dan angkasa sebagai jalan atau jalurnya, di mana pesawat dilengkapi dengan navigasi dan alat telekomunikasi yang canggih. Angkutan udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Dengan perkembangan zaman transportasi sangat diminati oleh masyarakat banyak. Dengan demikian banyak berkembang jasa-jasa transportasi di Indonesia.

5. Azas-azas Pengangkutan

- a. Azas hukum publik. Asas ini merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak yang dalam pengangkutan, pihak ketiga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkepentingan dengan pengangkutan dan pihak pemerintah. Asas bersifat publik ini terdiri atas:³⁸

- 1) Asas manfaat, yaitu bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga Negara.
- 2) Asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu bahwa dalam setiap kegiatan penyelenggara usaha pengangkutan yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.
- 3) Asas adil dan merata. Asas ini mengharuskan setiap penyelenggaraan pengangkutan untuk dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- 4) Asas keseimbangan, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- 5) Asas kepentingan umum asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam berkehidupan bermasyarakat, di mana penyelenggara angkutan

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus menaati aturan untuk mewujudkan suatu ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat.

- 6) Azas keterpaduan, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, saling mengisi baik antar maupun antar pengangkutan.
- 7) Asas tegaknya hukum, yaitu bahwa pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam menyelenggaraan pengangkutan.
- 8) Asas percaya diri, yaitu bahwa setiap penyelenggara pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.
- 9) Asas keselamatan penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus dengan asuransi kecelakaan dan/atau kerugian lainnya.
- b. Asas hukum perdata, yaitu landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi semua pihak dalam pengangkutan niaga, pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas hukum perdata pengangkutan berlandaskan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 15 tahun 1992. Azas hukum perdata terbagi atas:³⁹

³⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Asas konsesual, yaitu bahwa perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis bisa juga dengan kesepakatan antar pihak yang terlibat. Akan tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu telah terjadi harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan.
- 2) Azas koordinatif, yaitu bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar karena pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.
- 3) Asas campuran, yaitu bahwa pengangkutan merupakan campuran dari dua jenis perjanjian yaitu pemberi kuasa, penyimpanan barang, mengantar penumpang dengan aman sampai tujuan.
- 4) Azas tanpa hak retesi, yaitu bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retesi (hak menahan barang). Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas pemiliknya.
- 5) Azas pembuktian dengan dokumen, yaitu bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan.

6. Peranan Transportasi

Peranan transportasi dapat diketahui sebagai berikut:⁴⁰

- a. Transportasi dan kehidupan masyarakat

Transportasi bermanfaat bagi masyarakat dalam arti hasil-hasil produksi dan bahan-bahan baku suatu daerah dapat dipasarkan kepada

⁴⁰Abbas Salim, *Op., Cit.*, h.,11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan industri. Hasil-hasil barang jadi yang diproduksi oleh pabrik dijual oleh produsen kepada masyarakat atau perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Dalam proses ini jasa transportasi (darat, laut dan udara) sangat dibutuhkan agar barang-barang yang hendak dijual dapat mencapai konsumen ataupun distributor.

Di samping itu transportasi bermanfaat dalam proses penyebaran penduduk dan pemerataan pembangunan. Penyebaran penduduk ke seluruh pelosok tanah air di Indonesia menggunakan berbagai jenis moda transportasi.

b. Spesialisasi secara Geografi

Setiap daerah mempunyai kekhususan dalam arti spesialisasi yang berbeda untuk masing-masing daerah dan wilayah seperti kerajinan-kerajinan. Hasil-hasil suatu daerah yang di kerjakan spesialisasi secara geografis tersebut akan dapat dijual dan dipasarkan dengan pengangkutan-pengangkutan yang ada di Indonesia.

c. Produksi yang ekonomis

Suatu produksi akan bermanfaat dan ekonomis bila tersedia cukup moda transportasi. Adanya kaitannya transportasi dengan produksi dalam arti untuk pelemparan komoditi tersebut ke pasar (*market*).

Hubungan yang sangat jelas antara transportasi dengan produksi dapat dilihat dari berbagai aspek. *Pertama*, dengan tidak tersedianya transportasi maka masyarakat tidak akan menikmati keuntungan dari produksi. *Kedua*, dalam rangka peningkatan produksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penjualan tersebut, maka harus diusahakan kemanfaatan alat angkut seefektif dan seefisien mungkin. *Ketiga*, pengelolaan moda transportasi yang efektif dan efisien akan memberikan dampak makro dan mikro terhadap pembangunan ekonomi.

d. Pembangunan Nasional dan Hamkamnas

Berperan sebagai pembangunan nasional dan pembangunan seluruh wilayah Indonesia serta pemerataan pembangunan dan juga berperan sebagai pertahanan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Dengan adanya transportasi akan menciptakan dan meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang tercipta berimbas kepada pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini disebabkan daerah yang telah dibangun mengharuskan adanya hamkamnas bagi penduduk daerah tersebut.

7. Kriteria kinerja Transportasi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan atau kinerja dari sistem operasi transportasi ialah:⁴¹

a. Faktor tingkat pelayanan

1) Kapasitas

Kapasitas dinyatakan sebagai jumlah penumpang atau barang yang bisa dipindahkan dalam suatu waktu dan keadaan tertentu, misalnya orang/jam atau ton/jam. Dalam hal ini, kapasitas merupakan fungsi dari kapasitas atau ukuran tempat atau sarana

⁴¹Virna Museliza, *Pengaruh Atribut Produk Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Memilih Layanan Taksi KOPSI di Kota Pekanbaru* (Pekanbaru:LP2KM UIN SUSKA, 2014), h. 40., Cet.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transportasi dan kecepatan serta mempengaruhi besarnya tenaga gerak yang dibutuhkan.

2) Aksesibilitas

Aksesibilitas menyatakan tentang kemudahan orang dalam menggunakan suatu sarana transportasi tertentu dan bisa berupa fungsi dari jarak maupun waktu. Suatu sistem transportasi sebaiknya bisa diakses dengan mudah dari berbagai tempat dan pada setiap saat untuk mendorong orang menggunakannya dengan mudah.

b. Faktor kualitas pelayanan

1) Keselamatan

Keselamatan erat hubungannya dengan masalah kemungkinan kecelakaan dan terutama berkaitan erat dengan sistem pengendalian yang digunakan. Suatu sistem transportasi yang mempunyai suatu sistem pengendalian yang ketat, biasanya mempunyai tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi.

2) Keandalan

Keandalan berhubungan dengan faktor-faktor seperti ketetapan jadwal dan jaminan sampai ditempat tujuan. Suatu sistem transportasi yang andal berarti bahwa penumpang dan/atau barang yang diangkutnya bisa sampai pada waktu yang tepat dan tidak mengalami gangguan kerusakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Fleksibelitas

Fleksibelitas adalah sikap untuk mampu menyesuaikan keadaan dengan situasi dan kondisi tertentu yang datang tidak dapat di duga. Kemudahan yang ada dalam mengubah segala sesuatu yang diakibatkan adanya kejadian yang berubah atau tidak sesuai dengan standar yang direncanakan.

4) Kenyamanan

Kenyamanan dalam perjalanan merupakan hal utama yang diinginkan oleh para penggun jasa transportasi. Kenyamanan transportasi, terutama berlaku untuk angkutan penumpang, erat kaitannya dengan tata letak tempat duduk, sistem pengaturan udara di dalam kendaraan, ketersediaan, kebersihan dan fasilitas khusus.

5) Kecepatan

Kecepatan merupakan faktor yang sangat penting dan erat kaitannya dengan masalah efisiensi sistem transportasi. Dengan memperhatikan kecepatan dalam menjalankan trayeknya juga harus mempertimbangkan keselamatan pengguna jasa.

6) Dampak

Dampak dari keberadaan transportasi ini sangat beragam, mulai dari dampak lingkungan sampai dampak sosial politik yang ditimbulkan/diharapkan oleh adanya suatu operasi lalu lintas serta besarnya konsumsi energy yang dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Faktor Ekstern yang Mempengaruhi Transportasi

Untuk pengelolaan transportasi, banyak faktor eksteren yang mempengaruhi jalannya kegiatan perusahaan antara lain:⁴²

a. UU/PP - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Undang-Undang atau kebijakan pemerintah merupakan faktor dominan yang mempengaruhi terhadap pengelolaan usaha transportasi. Sebagai contoh yaitu Undang-Undang Lalu Lintas di jalan raya, pengaturan yang menyangkut dengan berhubungan dengan penerbangan dan pengangkutan di laut (Solas).

b. Kebijaksanaan/Pengaturan pihak Pemerintah Pusat dan Daerah

Kebijaksanaan pemerintah yang ikut mempengaruhi atas usaha transportasi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pengadaan bus untuk umum (ada merek jenis-jenis tertentu yang ditentukan oleh pemerintah yang bisa dipakai untuk umum) selain itu ada Undang-Undang mengatur mengenai transportasi.

c. Pengaruh Pemakai Jasa

Perusahaan angkutan jalan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa angkutan diharapkan agar memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna jasa. Bagi pemakai jasa yang diutamakan dalam soal pengangkutan ialah aman, teratur, memuaskan, cepat serta menyenangkan.

⁴² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinggi rendahnya pendapatan (*income*) suatu perusahaan angkutan (umpamanya angkutan antarkota) tergantung pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

9. Sejarah Transpotasi

Selama berabad-abad, warga perkotaan melakukan perjalanan dalam kota dengan berjalan kaki. transportasi bukan masalah utama karna kota masih kecil, dan semua tempat di dalam kota masih terjangkau dengan berjalan kaki dalam periode waktu yang singkat. hanya kaum berada yang dapat menikmati perjalan dengan menunggang kuda.⁴³

Dengan refolusi industri abad ke 19 kota-kota mualai berkembang dan penduduknya semakin banyak, dan dengan perkembangan ini muncullah kebutuhan untuk melakukan perjalanan untuk jarak yang lebih jauh, yang selanjutnya meningkatkan kebutuhan akan cara-cara transportasi yang lebih baik. Dengan demi kendaraan yang dihela hewan menjadi lazim digunakan untuk transportasi umum dan pribadi. perkembangan ini menyebabkan dimensi baru dalam transportasi dan bentuk baru kemacetan lalu lintas.

Pada zaman kendaraan hela hewan, sebaagian besar jalan kota belum diaspal. untuk menyediakan permukaan jalan yang lebih mulus sehingga memungkinkan satu kuda melakukan pekerjaan ini, banyak perusahaan membangun kereta-rel jalan untuk kendaraan trasit yang dihela kuda. “Trem” yang dihela kuda ini sama dengan yang digunakan di New

⁴³C. Jotin Khisty, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*, (Jakarta : PT. Gelara Aksaya Data, 2003), h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

York City pada pertengahan abad ke 19. Namun demikian, kemunculan rel ini tidak menaikkan kecepatan atau jangkauan kendaraan yang dihela kuda.

Andrew Hallidie mencari sumber tenaga yang lebih baik untuk kendaraan transit; dia mengembangkan kereta kabel. Walaupun kereta kabel tidak perlu lebih cepat dari pada kendaraan yang di hela kuda, kereta kabel ini menghapuskan penggunaan kuda dan kotoran yang di hasilkannya. San Fransico adalah yang pertama pada 1874 kereta kabel memiliki keterbatasan pada kecepatan dan jarak tempuhnya sehingga digantikan oleh trem listrik pada akhir 1880. sistem trem listrik muncul hampir disetiap kota Amerika Serikat dan bahkan di beberapa kota yang berpenduduk kurang dari 50000 jiwa. Tidak di ragukan lagi bahwa trem ini adalah pengembangn penting dalam trasnportasi perkotaan karena trem ini menyediakan jarak yang lebih jauh dan kecepatan operasi yang lebih tinggi. Sekali pun demikian, tidak menghilangkan kemacetan. dengan kemunculan trem banyak kota yang mendarai bahwa sebangian luas jalannya tidak mencakupi lagi untuk menampung jaringan trem dan di tambah masih harus melayani lalu lintas kareta kuda dan kereta kuda roda-dua sehingga kota-kota ini membangun pasilitas diatas jalan.

Lantaran kendaraan transit yang menggunakan fasilitas layanan terbatas dari gangguan lalulintas seperti dipermukaan tanah, kendaraan ini dapat berjalan lebih cepat; dengan demikian, angkutan kereta api cepat telah lahir sebelun peralihan abad itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Boston mulai menggunakan sistem bawah tanah kira-kira pada 1885 dan New York membuka sekmen pertama sistem ini pada 1904. Namun, kemacetan belum hilang. Bus bermesin semakin populer ketika kemajuan teknologi meningkatkan kemampuan operasinya. Bus-tingkat bertenaga uap digunakan di London pada awal abad ke-20. Penumpang dapat menumpang dilantai atas, yang terbuka, dengan separo angkos. Penting untuk diperhatikan bahwa bus bermesin menjadi populer di London. Dan persis 20 tahun kemudian bus bermesin ini baru populer di Amerika Serikat. Kira-kira pada abad 1920, perusahaan transit mulai menggantikan jaringan trem dengan jaringan bus karena kelulusan bus sebagai kendaraan transit. Bus lebih cocok dengan berbagai kondisi lalu lintas, dan rutenya dapat diubah manakala kebutuhan berubah. Sekalipun demikian, penggunaan bus belum dapat menghilangkan kemacetan. Sekarang, kira-kira $\frac{3}{4}$ penumpang transit diangkut oleh bus.

Perubahan besar transportasi kota dimulai pada 1893 ketika Duryea Brothers membangun mobil bermesin bensin pertama. Mereka tidak begitu menyadari bahwa mereka sedang membuat suatu terobosan yang akan merombak secara keseluruhan transportasi dan gaya hidup di dunia. Teknologi yang berkembang pesat, termasuk metode produksi ini perakitan, mampu menghasilkan mobil yang handal. Dan harganya masih dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat Amerika.

Sejak 1920-an, perjalanan dengan mobil telah mengalami pertumbuhan yang fenomenal, dan negara-negara maju telah mencoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk selalu mendahului perkembangan ini dengan pengembangan sistem jalan baru. Di Amerika Serikat perkembangan jalan secara besar-besaran ialah *the Primary System*, yang diciptakan sebagian dari *the Federal Aid Highway Act 1921*. Primary sytem hanya mewakili 7% dari panjang jalan desa secara nasional, sehingga perlu dilengkapi dengan sistem lain. Hasilnya, C dibuat pada 1944. Selain itu, pada 1944, sistem *the Federal Aid Urban Extension* diciptakan untuk memberikan *kelanjutan the federal Aid Primary* dan *Secondary sytem* kekawasan perkotaan.

Pada 1956, yang paling besar dari seluruh upaya pekerjaan umum masa damai di Amerika Serikat, *the Interstate Hightway Sytem*, dimulai, yang berkesudahan dengan pembangunan kira-kira 42.000 mil jalan bebas hambatan. Sitem ini menggiring era perjalanan di jalan bebas hambatan antar-kota dan memperkenalkan hambatan antar-kota dan memperkenalkan pengangkutan antra-kota dengan menggunakan truk komersial sebagai pesaing yang layak untuk kereta api. Dana federal (90%) dan negara bagian (10%) telah digunakan membangun sisstem *Interstate*, yang terutama diperoleh dari pajak penjualan bensin. Ada beberapa ketetapan yang ddisah kan berkaitan deengan jalan raya angkutan umum.

Perubahan-perubahan ini merupakan bukti bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan trasportasi yang terus meningkat dengan mengembangkan sistem- sistem baru dan membangun lebih banyak fasilitas baru. Namun demikian, kebutuham ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah naik lebih besar daripada kemampuan pemerintah untuk mengembangkan dan membangun fasilitas-fasilitas baru.

Benar-benar dirasakan bahwa inilah saatnya untuk bertindak tegas-dengan meminta “pengorbanan”guna membuat sistem tersebut lebih efisien. Moda-moda transportasi alternatif telah diusulkan sebagai kemungkinan pengganti mobil pribadi. Kita dapat mengingat alternatif yang telah dicoba, hanya untuk menggantikan moda transportasi yang lebih sepadan dengan gaya hidup yang lebih kita sukai. Kembali menggunakan angkutan kereta api cepat dianggap sebagai suatu penyelesaian untuk masalah transportasi perkotaan. Namun angkutan kereta api-cepat sering membutuhkan pengeluaran modal yang lebih besar daripada pengeluaran untuk sistem jalan bebas hambatan, dan hampir sebagian besar angkutan kereta api cepat ini sulit mengembalikan investasi ekonomis akibat penurunan tingkat-tumpangan.

Kesan umum yang muncul adalah bahwa penurunan tingkat-tumpangan transit telah terjadi sejak perang dunia II. Hal itu karena data umumnya dipetakan hanya pada periode tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya atas penurunan tersebut, kita harus memetakan data tingkat-tumpangan itu hingga tahun 1900. Kemudian akan terlihat bahwa penurunan itu sebenarnya pada 1920-an. Sekilas, hal ini bersesuaian dengan penggunaan mobil yang meluas. Kita mungkin memperhatikan bahwa tingkat-penumpangan menjadi stabil selama depresi 1930-an dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian memuncak lagi selama tahun-tahun peperangan, ketika terjadi kekurangan mobil dan bahan bakar yang parah.

Jelaslah, penurunan utama angkutan massal telah terjadi sejak perang dunia II. Sebagian merasa bahwa kenaikan ongkos telah menyebabkan penurunan itu, dan telah mengusulkan pelayanan angkutan dengan ongkos yang lebih murah tau gratis, dan tetapi ini lebih bersipat sibdrum. Penting kita ingat bahwa penurunan tingkat tumpangan ini mulai terjadi pada 1920-an dan selagi hanya oleh keadaan depresi ekonomi yang tak menguntungkan dan diikuti oleh beberapa perang besar.

Jumlah mobil telah meningkat sebanding dengan penduduk 1920. Rasio orang terhadap mobil telah berubah drastis 20 berbanding 1 pada 1920 dibandingkan dengan 2 berbanding 1 pada 1980. Pendapatan pribadi yang terus naik, atau kemakmuran masyarakat mungkin merupakan alasan utama mengapa rakyat Amerika telah mencapai transportasi pribadi.

Faktor utama lainnya yang menyebabkan tingkat-tumpangan ialah jenis perumahan yang dibuat menggunakan berbagai moda transportasi ini. Penduduk perkotaan selalu lebih menyukai tanah agak terpisah yang dapat digunakan sebagai hunian keluarga-tunggal modern. Gaya hidup demikian tidak tercapai dalam batasan yang dikenakan oleh moda transportasi terdahulu. Perhatikan bahwa sealama era transportasi yang dihela-kuda dan kereta kabel, kota-kota besar mulai mengalami ledakan penduduk. Ketika bus dan mobil muncul, kedua nya memiliki keluasaan untuk menjangkau ruang terbuka diantara koridor-koridor ini bahkan hingga ketempat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih jauh lagi. Orang mulai menerimanya karena muncul kesempatan untuk memiliki hunian keluarga-tunggal didalan dan disekeliling kota-kota besar.

Dengan demikian, tampaklah bahwa faktor-faktor utama yang menentukan penurunan penggunaan angkutan umum ialah:

- a. Kemakmuran Masyarakat
- b. Ketersediaaan mobil yang terus membaik
- c. Keinginan memiliki rumah dikawasan yang tenang

Faktor-faktor ini telah terpaduuntuk menciptakan gaya hidup sehingga angkutan umum tidak akan pernah kembali keperan sebelumnya sebagai cara-cara utama dalam melakukan perjalanan diperkotaan. Namun tampaknya memang ada kebutuhan yang semakin meningkat akan beberapa bentuk transpotasi umum. Angkutan kereta api cepat bukanlah hal yang baru; sebenarnya sistem ini telah dikembangkan sebelum peralihan abad ke dua puluh. Tetapi sekarang terdapat minat baru atas angkutan kereta api cepat. Keberhasilan pda jaman modern ini tergantung kepada keberhasilan suatu sitem baru. Seperti keberhasilan di Totonto, Montreal, San Fransisco, Washinton, dan Atlanta.

Toronto merupakan kota pertaman menggunakan sistem ini, yang mengoperasikan sistem kereta api cepat di manapun, kita harus memperhatikan betapa perbedaan dalam gaya hidup. Warga toronto maupun Montreal tinggal dalam kawasan padat penduduk yang berbeda di bandingkan kawasan tempat tinggal di banyak kota Amerika Serikat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Toronto memiliki banyak gedung apartemen bertingkat tinggi, sementara sehingga besar warga Montreal tinggal tinggal dalam rumah petak yang terdiri atas enam atau lebih keluarga dalam satu baris petak. setiap hari sama banyaknya dengan bus yang memasuki pusat kota-kota di Amerika Serikat.

Salah satu sitem yang benar-benar beroperasi yng akan dibuka di Amerika Serikat ialah sistem BART, *Bay Area Rapid Transit*, yang melayani kawasan San Fransico-Oakland. Sistem ini memang lebih modern penampilannya daripada sistem-sistem sebelumnya dan di rancang otomatis. Masinis kareta api ini menjalankan dan menghentikan kareta api ini;atau sebaliknya, melalui kendali komputer. Gerbangnya lapang, nyaman, dan berpenampilan modern dengan lapisan tempat duduk yang bagus serta lantai berkarpet.

C. Konsep Ketenagakerjaan

1. Pengertian dan Asas Pembangunan Ketenagankerjaan

a. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan menurut imam Soepomo diartikan sebagai himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah⁴⁴. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah pemburuhan. Setelah kemerdekaan ketenagakerjaan di

⁴⁴ Hani Regina Sari. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggaraan Keminan Social Ketenaga Kerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011*. Jurnal fakultas hukum universitas Lampung. 2018. h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia diatur dengan ketentuan Undang-Undang No. 141 Tahun 1969 tentang pokok-pokok ketentuan Tenaga kerja. Pada tahun 1997 undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan UU No. 25 Tahun 1997 tentang banyak menimbulkan protes dari masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan masalah jamsostek yang berdasarkan dibangun berdasarkan dugaan kolusi menyimpang dana jamsostek. Keberadaan UU No 25 Tahun 1997 mengalami penangguhan dan yang terakhir diganti oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU No.13 Tahun 2003.

Apabila ditelaah dari pengertian istilah, hukum ketenagakerjaan terdiri dari atas dua kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dan ketenagakerjaan merupakan dua konsep hukum. Konsep hukum yang sangat dibutuhkan apabila mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu.

Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut hukum pemburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeitsrecht*. Terdapat dari beberapa pendapat atau batasan tentang pengertian hukum pemburuhan. Molenaar memberikan batasan dari *arbeitsrecht* adalah bagian hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan. antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mr. MG Levenbach. *Arbidsrecht* sebagai suatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerja itu dilakukan dibawah pinpinan dan dengan keadaan penghidupan langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Iman Soepomo memberikan batasan hukum pemburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkedaan dengan kejadian dimana seseorang yang bekerja pada orang lain dengan meneripa upah.

Pengertian hukum perburuhan mengandung tiga unsur, yaitu:

- 1) Adanaya peraturan
- 2) Bekerja pada orang lain,dan
- 3) Upah.

Peraturan mencakup aturan hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis meliputi seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. Tahun 2004 tentang Pembuatan Pearaturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 53, selanjutnya disebut dengan UU NO.10 Tahun 2004), yaitu

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum yang tidak tertulis misalnya hukum kebiasaan.

Bekerja pada orang lain dapat diartikan orang tersebut bekerja diluar hubungan kerja (yang meliputi swapekerja/wiraswasta) dan mereka yang bekerja didalam hubungan kerja. Bekerja kepada orang lain didalam hubungan kerjaan meliputi mereka yang bekerja kepada bnegara disebut pengawai negeri atau pengawai pemerintah. Mereka menjalankan tugas negara berdasarkan surat keputusan pengangkatan pengawai negeri, baik sipil maupun ABRI/TNI. Adapaun mereka yang bekerja kepada orang lain adalah mereka yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau perjanjian pemborongan.

Selanjutnya penerimaan upah bagi buruh merupakan konsekuensi buruh yang telah menyerah tenaganya untuk bekerja. Upah merupakan hal buruh setelah mereka melakukan pekerjaannya. Kebalikan pemberian upah dalam hubungan kerja adalah adanya kewajiban majikan atau pemberi kerja untuk memebrikan pekerjaan. Adanya kewajiba pemberian uapah berarti dapat ditafsirkan adanya kewajiban untuk memberikan pekerjaan.

Pengertian hukum perburuhan menurut Molenaar,MR.MG Levenbach, dan Imam Soepomo, kesemuanya hukum yang menagatur hubungan buruh antara dengan majikan. Adapaun pengertian hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Sebelumyan telah disebutkan bahwa tanaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, dan orang yang belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja atau pengangguran. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa hukum ketenagakerjaan berarti mencakup bidang hukum pengawaaian (hukum yang mengatur tentang hubungan antara negara dan pengawai/pegawai negeri) dan bidang hukum pemburuan (mengatur hubungan antara buruh dengan majikan).

Istilah buruh dapat juga disebut dengan pekerja atau penerima kerja. Adapaun istilah majikan dapat disebut dengan penguasaha atau pemberi kerja. Buruh tidak sama dengan pengawai. Perbedaan itu terletak dari subjek hukum yang melakukan hubungan hukum. Hukum perburuan mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja dengan buruh, pekerjaan atau penerima kerja. Hukum kepegawaian mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh negara dengan pegawai/pegawai negeri.

Penanaman UU No. 13 Tahun 2003 dengan Ketenagakerjaan adalah kurang tepat karena isinya yang terkandung didalam UU Keetenagakerjaan adalah kurang tepat karena isinya telah terkandung di dalam UU Ketenagakerjaan hanya meencakup ketentuan yang mengatur hubungan kerja yang dilakukan oleh penguasa atau pemebri kerja dengan buruh, pekerja atau penerima kerja (tebatas yang formal saja), serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Sama sekali belum mengatur tentang hubungan kepegawaian, pekerja yang informal, dan pengangguran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Asas Pembangunan Ketenagakerjaan

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 19945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan ketenagakerjaan untuk meningkat kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dengan pembagubangunan serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarga yang tepat memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu pembagunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesi Tahun 1945. Berdasarakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:⁴⁵

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Untuk melaksanakan tujuan dibidang ketenagakerjaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2003, ditetapkan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
- 2) Merencanakan tenaga kerja meliputi:
 - a) Meperncanaan tenaga kerja makro, dan
 - b) Meperncanaan tenaga kerja mikro.
- 3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan,

⁴⁵ Kitab Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu:

- 1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi;
 - a) Penduduk dan tenaga kerja
 - b) Kesempatan kerja;
 - c) Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
 - d) Produktivitas tenaga kerja;
 - e) Hubungan industrial;
 - f) Kondisi lingkungan kerja;
 - g) Pengupahan dan kesejahteraan kerja;
 - h) Jaminan sosial tenaga kerja.
- 2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari sebuah pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya atas demokrasi, asas adil dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merata. Pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang paling mendukung.

c. Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

Berdasarkan ketentuan pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 5, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha kedudukan buruh dan majikan atau antara pengusaha dan pekerja berbeda dengan kedudukan antara penjual dengan pembeli.

Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara pekerja atau bisa dikatakan juga sebagai buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang. Karena seringkali pekerja/buruh berada pada posisi yang lemah.⁴⁶

⁴⁶ Fenny Natalia Khoe, *Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya). Vol 2 No. 1 2013. h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan tidak sama sederajat ini mengingatkan buruh hanya mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selain itu, majikan sering menganggap buruh sebagai objek dalam hubungan kerja. Pekerja sebagai faktor ekstern dalam produksi bahkan ada yang beranggapan majikan sebagai *herr im haus* (ibaratnya ini adalah rumahku terserah akan aku gunakan untuk apa). Maksudnya majikan adalah pemilik dari perusahaan itu, sehingga setiap kegiatan apa pun tergantung dari kehendak majikan.

Keadaan ini menimbulkan adanya kecendrungan majikan untuk berbuat sewenang-wenang kepada pekerja/buruhnya. Buruh di pandang sebagai objek. Buruh dianggap sebagai faktor ekstern yang berkedudukan dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang menjadikan perusahaan.

Majikan dapat dengan leluasa menekan pekerja/buruhnya untuk bekerja secara maksimal, melebihi kemampuan kerjanya. Misalnya majikan dapat menetapkan upah hanya maksimal sebanyak upah minimum propinsi yang ada, tanpa melihat masa kerja dari pekerja itu. Seringkali pekerja dengan masa kerja yang lama upah hanya selisih sedikit sedikit lebih besar dari upah pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Majikan enggan untuk meningkatkan atau menaikkan upah pekerja meskipun terjadi peningkatan hasil produksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dialih bahwa takut diprotes oleh perusahaan-perusahaan lain yang sejenis.

Secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni “selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang perintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap penguasa.

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukan yang lemah. Disebut oleh Zainal Asikin, yaitu: Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersesebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. Bruggink membagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberlakuan hukum menjadi tiga, yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif, dan keberlakuan evaluatif/material.

Keberlakuan faktual, yaitu kaidah dipatuhi oleh para warga masyarakat/efektif kaidah diterapkan dan ditegaskan oleh pejabat hukum, keberlakuan normatif, yaitu kaidah cocok dalam sistem hukum hierarkis, keberlakuan evaluatif, yaitu secara empiris kaidah tanpak diterima, secara filosofis kaidah memenuhi sifat mewajibkan karena isinya.

d. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan

Berdasarkan uraian mengenai hakikat hukum ketenagakerjaan diatas maka menjadi dasar dalam pemeberian perlindungan hukum bagi pekerja. Pemeberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi lima bidang hukum pemburuhan, yaitu

- 1) Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja;
- 2) Bidang hubungan kerja;
- 3) Bidang kesehatan kerja;
- 4) bidang keamanan kerja;
- 5) Bidang jaminan sosial buruh.

Bidang pengerahan/penetapan tenaga kerja, adalah perlindungan hukum yang di butuhkan para pekerja sebelum ia menjalankan hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa penetapan atau pengerahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang hubungan kerja, masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu didahului oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap.

Bidang kesehatan kerja, adalah selama menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatannya. Apakah lingkungan kerjanya menjamin kesehatan tubuhnya dalam jangka yang relatif lama.

Bidang keamanan kerja, adalah adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan kesehatan bagi pekerja. Alam hal ini negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja. Yang terakhir adalah bidang jaminan sosial buruh. Telah diundangkan Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Pada Tahun 1992, besarnya kompensasi dan batas maksimal yang diakui oleh PT Jamsostek dapat dikatakan cukup. Untuk saat ini kompensasi ataupun batas maksimal upah yang diakui untuk pembyaran premi jamsostek sesudah saatnya dilalukan revisi penyesuaian.

e. Sifat dan Kedudukan Ketenagakerjaan

Sifat Hukum Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah masuk lingkup hukum pripat, mengigat bidang-bidang kajian hukum itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan satu kesatuan dan tidak mungkin dilakukan pemisahan maka menjadikan hukum ketenagakerjaan termasuk dalam hukum fungsional, yaitu mengandung bidang hukum lainnya.

1) Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Ditinjau dari sipatnya, hubungan pemburuhan dapat bersipat pripat/perdata dan dapat pula bersipat publik. Bersipat pripar karena mengatur hubungan antara borang dan perseorangan (pembuatan perjanjian kerja). Bersipat publik karena pemerintah ikut campur tangan dalam masalah-masalah pemburuhan serta adanya sanksi pidana dalam peraturan hukum perburuhan.

Buruh perlu dilindungi oleh negara melalui campur tangan pemerintan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah membuat peraturan-peraturan yang mengikat buruh dan majikan; membina dan mengawasi proses hubungan industrial.

Selain hukum ketenagakerjaan mendasarkan pada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menghasilkan UU 25 Tahun 1997 yang keberdayaannya menimbulkan perdebatan, sehingga ditunda masa berlakunya oleh UU No 11 Tahun 1998 jo. Perpu No 3 Tahun 2000 jo. UU No. 28 Tahun 2000 sampai tanggal 1 Oktober 2002. Kenyataannya penggganti UU No. 25 Tahun 1997 yang meliputi RUU pembinaan dan perlindungan ketengakerjaan (PPK) dan RUU penyelesaian hubungan industrial (PPHI) itu disetujui oleh DPR tanggal 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Februari 2003. Diundangkannya UU No.13 Tahun 2003 dalam lembaran Negara No.39 Tahun 2003 dan TLN No. 4279 hanya mencakup materi RUU pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan (PPK), sedangkan RUU PPHI disahkan menjadi UU NO. 2 Tahun 2004 tentang penyelisihan hubungan industrial.

2) Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan

Kedudukan ketenagakerjaan didalam tat hukum Indonesia terletak dibidang hukum administrasi/tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana kedudukan tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa ketentuan peraturan-peraturan hukum ketenagakerjaan haruslah mendasarkan pada teori hukum yang menelaah dibidang tersebut. Sayangnya hal ini masih jauh terlaksana apabila kita melakukan pengkajian. Kedudukan hukum ketenagakerjaan didalam tata hukum Indonesia.

a) *Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan di Bidang Hukum Perdata*

Kedudukan hukum ketenagakerjaan di bidang hukum perdata pada hakikatnya yang memegang peranan penting didalam hubungan industrial adalah pihak-pihaknya, yaitu buruh dan majikan saja.

Hubungan antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada hubungan hukum pripat. Hubungan ini didasarkan pada hukum perikatan yang menjadi bagian dari hukum perdata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah hanya berlaku pengawasan atau lebih tepatnya dapat menjalankan fungsi fasilitator apabila ternyata dalam pelaksanaan muncul suatu perselisihan yang tidak dapat mereka selesaikan.

Selain itu fungsi pengawasan dari pemerintah dapat maksimal apabila secara filosofis kedudukan lebih pemerintah lebih tinggi dari yang diawasi (buruh-majikan). Hal ini belum terlaksana karena pejabat Deknaker sebagai salah satu organ pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan, secara ekonomi masih dibawah majikan dan secara formal masih jauh dari ideal. Hal ini sebagai oknum Deknaker. Selain itu, pejabat Deknaker kadang ada yang menjalankan fungsi sebagai majikan contohnya dalam pengerahan TKI.

b) *Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan di Bidang Hukum Administrasi*

Kedudukan hukum ketenagakerjaan didalam hukum administrasi yang diperhatikan ada dua hal, yaitu dalam subjek hukum yang penyelenggaraan negara dan bagaimana perannya. Subjek hukum dalam penyelenggaraan negara menyangkut dalam tidak hal, yaitu pejabat, lembaga, dan warga negara. Pejabat dalam hal ini adalah pejabat negara yang tunduk pada ketentuan hukum administrasi.

Peranannya berkaitan dengan menjalankan fungsi negara di dalam perbuatan peraturan atau pemberian izin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*bestuur*), bagaimana negara melakukan pencegahan terhadap sesuatu hal yang dapat terjadi (*politie*) dan bagaimana upaya hukumnya (*rechtspraak*). Pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang ketenagakerjaan harus dapat melaksanakan ketiga fungsi itu dengan baik.

c) *Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan di Bidang Hukum Pidana*

Kedudukan hukum perburuhan dalam hukum pidana adalah pentingnya penerapan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan. Terdapat legalitas dalam hukum pidana, yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut sudah dituangkan dalam suatu undang-undang. Penerapan sanksi harus didasarkan pada ada tidaknya kesalahan yang dibuktikan dengan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang terjadi. Sanksi, hakikatnya merupakan perampasan hak seseorang, oleh karena itu dibuat secara demokratis. Bentuk peraturan yang mencerminkan situasi demokratis adalah undang-undang atau peraturan daerah karena dalam pembuatannya melibatkan suara atau wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR atau DPRD.

Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam tata hukum Indonesia secara teoretis dapat dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu perdata, administrasi, dan pidana. Dalam praktiknya harus dijalankan secara berhubungan satu sama lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan hukum yang dilakukan pengusaha dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja, pengaturannya masuk ruang lingkup hukum perikatan yang menjadi bagian hukum perdata. Selama proses pembuatan, pelaksanaan dan berakhirnya hubungan kerja yang diawasi oleh pemerintah sebagai konsekuensi menjalankan fungsi *bestuur*, *politie* dan *rechtspraak*. Apabila selama proses pembuatan, pelaksanaan, dan berakhirnya hubungan kerja yang terdapat pelanggaran hukum maka di tetapkan sanksi pidana yang menjadi kajian dalam bidang hukum pidana.

Permasalahan hukum perburuhan yang lainnya adalah dalam kaitannya dengan globalisasi. Tenaga kerja yang tersedia di Indonesia sebagai besar adalah *unskillabour*, sementara tuntutan secara universal dalam kaitannya dengan era pasar bebas menurut adanya kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja (servis/jasa) dan barang yang masuk atau yang keluar.⁴⁷

⁴⁷Asri Wijayanti *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap supir yang mengalami kecelakaan pada PT. Dolok Sordang menurut undang undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan padang lawas kota sibuhuan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ada beberapa supir yang bertanggung jawab sendiri dan mengganti kerugian sendiri saat supir mengalami kecelakaan.
2. Faktor penghambat perusahaan Travel Dolok Sordang dalam melakukan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan mobil ini adalah akibat kurang pahamnya perusahaan terhadap aturan tentang ketenagakerjaan dan Undang Undang No 13 Tahun 2003, kurangnya anggaran yang disediakan oleh perusahaan dan kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah terhadap aturan ini agar supir travel dapat menikmati gajinya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Perusahaan PT. Dolok Sordang diharapkan lebih selektif dalam merekrut karena dalam mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membawa dan mengantar penumpang selamat sampai tujuan. Perusahaan PT. Dolok Sordang di harapkan memberikan aturan kepada supir dan awak kendaraan sebelum melakukan perjalanan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan, perusahaan PT Dolok Sordang untuk memeriksa keadaan supir awak kendaraan sebelum melakukan perjalanan. diharapkan tidak berbelit-belit dalam mengganti kerugian yang ditanggung oleh korban kaeran sudah menjadi tanggung jawab sebagai pihak tertanggung.
2. Pemerintah dapat dikontrol dan mengawasi penggantian kerugian oleh perusahaan oleh perusahaan asuransi kepada korban kecelakaan. Pemerintah diharapkan untuk selalu mengawasi dan dan memeriksa sarana transportasi seperti keadaan jalan raya dan rambu-rambu lalu lintas untu mengurangi risiko kecelakaan kendaraan .Pihak kepolisian diharapkan untuk menindak secara tegas bagi para pelanggar peraturan jalan agar pelanggar jera dan tidak mengulagi perbuatan lagi dikemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Abdulkadir Muhammad, *Hukum pengantar Niaga bandung*: PT. Citra Aditiya Bakti, 2013

M.Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* Kominikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu – Ilmu Sosial Linnya

H.M. N. Purwotijpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pengangkutan* Jakarta Djambatan 1084

Kamiruddin, Yooke Tjuparmah S.Komaruddin, *kamus istilah Karya Tulis Ilmiah* Jakarta Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UII Press, 1982

Sugiono, *Metode Peneltian Kuantitatif dan R&d*, Bandung :Alfabeta , 2016

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2015

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan* Jakarta Erlangga, 2012

Zainal Asikin *Hukum Dagang* Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2013

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Susetyo, S.(2010),” Some notes on the megalithic remains in Padang Lawas”, dalam Simanjuntak, T,; Hisyam, M,; Prasetyo, B,; Nastiti, T.S., Archaeology, Indonesia Perspective: R.P Seocono’s Festschrift, Jakarta: LIPI Press,

<https://pttrb-travel.business.site/> diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 22.31 WIB

S.T. Kansil Crhristine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Aspek Hukum dalam Ekonomi), Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahardjo Adisasmita, *dasar dasar ekonomi trasnfortasi*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010, Cet ke-1

Sation Usman, dkk *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990 Cet ke-2

Setijati D. Sastraoradja, *Memupuk kehidupan di Nusantara*, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Oktober 2010

Edel Miro, *pengantar sistem trnsportasi*, Erlangga 19 Oktober 2013

Jotin Khisty, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*, Jakarta : PT. Gelara Aksaya Prata, 2003

Astri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum

Andi Astriyani Mattanang, *aspek hukum perjanjian terhadap jasa angkutan darat*, jurnal hukum,vol 1,no,3,2013.

Putu Agus Putrawan, *tanggung jawab perusahaan angkutan wisata dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan dan kecelakaan lalu lintas*, vol 7, no, 3, 2019

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Pasal 191 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan* Pasal 237

Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 86

Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Teantang *Ketenagakerjaan* Pasal 237

Penny Natalia Khoe, *Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya). Vol 2 No. 1 2013.

Ktab Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

Hani Regina Sari. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Social Ketenaga Kerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011*. Jurnal ilmah fakultas hukum universitas Lampung. 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1. Transkrip Pertayaan Angket

Instansi : Perusahaan Travel PT Dolok Sordang Padang Lawas Kota

Sibuhuan

Waktu Pelaksanaan Wawancara : 30 Agustus 2019

ANGKET PENELITIAN

Angket ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban perusahaan travel terhadap supir yang mengalami kecelakaan pada PT Dolok Sordang menurut Undang Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan padang lawas kota sibuhuan

LOKASI

Padang lawas kota sibuhuan

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
 Nama perusahaan :
 Alamat :
 Jam :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PETUNJUK PENGISIAN

Jawablah pertanyaan berikut dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda centang pada pertanyaan yang tersedia di bawah ini

PERTANYAAN ANGKET TERHADAP RESPONDEN

1. Apakah pernah terjadi kecelakaan saat bekerja
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah perusahaan PT Dolok Sordang mau bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Pertanggungjawaban biaya pengobatan supir jika terjadi kecelakaan
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah supir PT Dolok Sordang sudah mematuhi aturan lalulintas
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah sarana prasarana PT Dolok Sordang telah mematuhi standar operasional
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah pihak peratama (direksi) memperhatikan proses travel jika terjadi pengangkutan penumpang atau barang
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah PT Dolok Sordang memberikan ganti rugi terhadap kecelakaan pada pengangkutan penumpang atau barang
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah PT Dolok Sordang telah menjalankan proses jika terjadi kecelakaan berdasarkan Undang Undang No13 Tahun 2003
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Jika terjadi kecelakaan, apakah PT Dolok Sordang menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Apakah pihak perusahaan pernah melakukan sosialisasi mengenai pertanggung jawaban apabila terjadi kecelakaan
 - a. Ya
 - b. Tidak
11. Apakah saudara mengetahui mengenai Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - a. Ya
 - b. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Syafrinaldi, SH, MH

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, September 2019

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal :PengajuanSkripsi

Sdri. Anner Sumantri Lubis

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

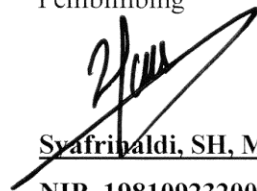
Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Anner Sumantri Lubis, yang berjudul ***"Pertanggungjawaban Perusahaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami Kecelakaan Pada Pt. Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Padang Lawas Kota Sibuhuan"*** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing



Syafrinaldi, SH, MA

NIP. 198109232006041004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal dengan judul **"PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TRAVEL TERHADAP SUPIR YANG MENGALAMI KECELAKAAN PADA PT.DOLOK SORDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PADANG LAWAS KOTA SIBUHUAN"** yang ditulis oleh :

Nama : Anner Sumantri Lubis
NIM : 11527204171
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Maret 2019
Narasumber : Joni Alizon, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2019

Narasumber

Joni Alizon, SH., MH
NIP.130217041

Kepala Sub. Bagian Akademik

Asfendi, S.Ag, M.Si
Nip.1961091819880311002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/4626/2019

Pekanbaru, 16 Mei 2019

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ANNER SUMANTRI LUBIS
NIM	: 11527204171
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: PT. Dolok Sordang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Pertanggungjawaban Perusahaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami Kecelakaan Pada
Pt. Dolok Sordang Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Padang Lawas Kota
Sibuhuan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 0057

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta
1. Dilarang
a. Pengutipan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta

Undang-Undang

1. Dilarang sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22843
T E N T A N G



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4626/2019 Tanggal 16 Mei 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : ANNER SUMANTRI LUBIS
2. NIM / KTP : 11527204171
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TRAVEL TERHADAP SUPIR YANG MENGALAMI KECELAKAAN PADA PT. DOLOK SORDANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PADANG LAWAS KOTA SIBUHAN
7. Lokasi Penelitian : PT. DOLOK SORDANG KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
- Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- ③ Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5542/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini

menerangkan bahwa :

Nama : ANNER SUMANTRI LUBIS
N I M : 11527204171
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 30 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Juni 2019

Dekan,

DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

- Hak Cipta UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANNER SUMANTRI LUBIS

NIM : 11527204171

Program Studi: ILMU HUKUM

Judul : *Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami Kecelakaan Pada Pt Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Padang Lawas Kota Sibuhuan*

Pembimbing : Syafrinaldi, SH, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Juni 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Anner Sumantri Lubis lahir di Hatongga, 13 Januari 1996 anak kedua (3) dari tiga (4) bersaudara dari pasangan Ayahanda Abdul Gani dan Ibunda Rosmaida Penulis memulai pendidikan SD di SDN 101970 Botung Btang Lubu Sutam tahun 2009. Selanjutnya menempuh pendidikan di MTs Nu Sibuhuan dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Swasta Kampus Padangsidimpuan pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan mengambil S1 Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah melaksanakan magang selama 2 bulan di Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pengaraian Selain itu penulis juga pernah melaksanakan KKN di Desa Masda Makmur, Kecamatan Rambah Samo, selama 45 hari. Kemudian pada Tahun 2019 penulis yang akrab disapa Anner ini memulai sebuah penelitian sosiologis dengan mengangkat sebuah judul skripsi: "Pertanggungjawaban Perusahaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami Kecelakaan Pada Pt Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Lawas Kota Sibuhuan" di bimbing oleh bapak Syafrinaldi, SH.,M.A dan kemudian penulis menyelesaikan studinya pada akhir tahun 2019.